



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 DINAS SOSIAL KAB. HSS



Kandangan, 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya jualah Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disusun sebagai bahan pertanggungjawaban baik anggaran maupun kegiatan. Dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah yang efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab serta meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu diupayakan suatu media pertanggungjawaban.

Pembuatan Laporan Capaian Kinerja ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pembuatan Laporan Capaian Kinerja selain sebagai media akuntabilitas juga merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai bahan informasi yang berguna bagi pengembangan organisasi.

Laporan Capaian Kinerja ini tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan Laporan Capaian Kinerja berikutnya. Atas segala bantuan, bimbingan dan kerja sama dari semua pihak sehingga tersusunnya Laporan Capaian Kinerja ini kami ucapkan terima kasih.

Kandangan, April 2018

Kepala Dinas Sosial
Kab. Hulu sungai selatan,



Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670328 198609 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2018 merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018. Laporan ini adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis.

Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2018 mengacu pada RPJMD Kab. HSS dan Revisi Renstra Dinas Sosial Kab. HSS tahun 2014-2018. Tujuan yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin;
2. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatkan perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
4. Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas;
5. Meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
6. Meningkatkan perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);
7. Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
8. Meningkatkan kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
9. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
10. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin;
2. Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
4. Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas;
5. Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
6. Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);

7. Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
8. Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
9. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
10. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.112.005.810,00 sedangkan realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp. 1.966.638.437,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 16,24%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 10.145.367.373,00 (*termasuk belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan pegawai*).

Sedangkan untuk realisasi belanja langsung saja (*diluar gaji dan tunjangan pegawai*) pagu sebesar Rp. 8.455.206.810 dengan realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp. 1.339.156.426,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 15,84%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.116.050.384,00.

Pencapaian yang diperoleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Triwulan I Tahun 2018 merupakan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang optimal oleh seluruh jajaran serta didukung oleh komitmen daerah dalam pembangunan bidang sosial. Diharapkan dukungan ini dapat terus dilanjutkan dalam upaya optimalisasi pembangunan bidang sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan bidang sosial diuraikan sebagai berikut :

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sesuai data dari BPS Kalsel adalah sebesar 6,67%. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 sebesar 4,76%;
2. Belum optimalnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial;

3. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, maka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan;
4. Adanya pergeseran-pergeseran norma yang terus terjadi dimasyarakat dapat melunturkan rasa patriotisme, semangat juang, semangat kepahlawanan dan menghargai para pejuang, oleh karena itu nilai-nilai kepahlawanan perlu terus dilestarikan;
5. Pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial masih perlu lebih ditingkatkan menuju pelayanan prima.

Permasalahan tersebut di atas dapat diberikan dengan solusi dan upaya-upaya sebagai berikut:

- Penanganan permasalahan sosial dengan menggunakan skala prioritas;
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan;
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada;
- Melibatkan peran aktif masyarakat, orsos, ormas, pihak swasta dan pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan bidang sosial;
- Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang baik untuk fasilitasi pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	2
1.3 Isu Strategis	5
1.4 Dasar Hukum	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	8
2.2 Indikator Kinerja Utama	18
2.3 Perjanjian Kinerja.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Indikator Kinerja	27
3.2 Pengukuran	29
3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	30
3.4 Akuntabilitas Keuangan	70
3.5 Prestasi / Penghargaan	76
BAB IV PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Hubungan Tujuan dan Sasaran 10
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan 13
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan 19
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2018 23
Tabel 3.1	Capaian IKU pada Triwulan I Tahun Anggaran 2018.... 28
Tabel 3.2	Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) 29
Tabel 3.3	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 31
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun ini dengan Tahun-tahun Lalu 32
Tabel 3.5	Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1 34
Tabel 3.6	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 35
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun ini dengan Tahun-tahun Lalu 36
Tabel 3.8	Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2 37
Tabel 3.9	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 39
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun ini dengan Tahun-tahun Lalu 41
Tabel 3.11	Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3 42
Tabel 3.12	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 44
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun ini dengan Tahun-tahun Lalu 45
Tabel 3.14	Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4 46
Tabel 3.15	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5 47
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun ini dengan Tahun-tahun Lalu 49
Tabel 3.17	Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 5 50

Tabel 3.18	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6.....	51
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun ini dengan Tahun-tahun Lalu	53
Tabel 3.20	Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 6.....	54
Tabel 3.21	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7.....	55
Tabel 3.22	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 Tahun ini dengan Tahun-tahun Lalu	56
Tabel 3.23	Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 7.....	57
Tabel 3.24	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8.....	58
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 Tahun ini dengan Tahun-tahun Lalu	59
Tabel 3.26	Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 8.....	60
Tabel 3.27	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9.....	61
Tabel 3.28	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 Tahun ini dengan Tahun-tahun Lalu	62
Tabel 3.29	Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 9.....	63
Tabel 3.30	Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10.....	64
Tabel 3.31	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 Tahun ini dengan Tahun-tahun Lalu	67
Tabel 3.32	Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 10.....	68
Tabel 3.33	Alokasi dan Realisasi pada Bidang Pemberdayaan Triwulan I Tahun 2018	71
Tabel 3.34	Alokasi dan Realisasi pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Triwulan I Tahun 2018	72
Tabel 3.35	Alokasi dan Realisasi pada Bidang Perlindungan Sosial Triwulan I Tahun 2018	73
Tabel 3.36	Alokasi dan Realisasi pada Sekretariat Triwulan I Tahun 2018.....	74

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 dibandingkan Dengan Target	32
Grafik 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 dibandingkan Dengan Target	36
Grafik 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 dibandingkan Dengan Target	41
Grafik 3.4 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 dibandingkan Dengan Target	45
Grafik 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 dibandingkan Dengan Target	48
Grafik 3.6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 dibandingkan Dengan Target	52
Grafik 3.7 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 dibandingkan Dengan Target	56
Grafik 3.8 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8 dibandingkan Dengan Target	59
Grafik 3.9 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 dibandingkan Dengan Target	62
Grafik 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10 dibandingkan Dengan Target	67

1.1 Latar Belakang

Pembentukan organisasi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13 Tanggal 04 Oktober 2016). Sedangkan Tugas Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 61 Tanggal 02 Desember 2016) adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Sosial sebagai Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Target Kinerja dan melakukan Pengukuran Kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja merupakan penyampaian akuntabilitas Instansi Pemerintah yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial pada Triwulan I Tahun Anggaran 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Sosial pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Sosial pada Triwulan I dalam satu tahun

anggaran kepada pemangku kepentingan. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang di Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Sosial;
- b. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan taman makam pahlawan;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas Sosial dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang.

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas:

1. Kepala Dinas

2. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya, terdiri dari :

- **Subbagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, kerjasama hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- **Subbagian Perencanaan dan Keuangan** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan, serta laporan keuangan.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemberdayaan sosial keluarga miskin, fasilitasi peningkatan akses masyarakat miskin serta pemberdayaan potensi dan lembaga sosial, terdiri dari :

- **Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan pemberdayaan sosial keluarga miskin.

- **Seksi Fasilitasi dan Peningkatan Akses Masyarakat Miskin** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan fasilitasi dan peningkatan akses masyarakat miskin.
 - **Seksi Pemberdayaan Potensi dan Lembaga Sosial** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan perizinan dan penyelenggaraan pemberdayaan potensi dan lembaga sosial.
- 4. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, pelayanan sosial anak dan lanjut usia, terdiri dari :
- **Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan pelayanan sosial anak dan lanjut usia.
 - **Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Tuna Sosial** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang cacat dan tuna sosial.
- 5. Bidang Perlindungan Sosial** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan sosial korban bencana dan korban tindak kekerasan, kepahlawanan, pengelolaan sumber dana sosial dan jaminan sosial, terdiri dari :
- **Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Korban Tindak Kekerasan** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan penyelenggaraan perlindungan sosial bagi korban bencana dan korban tindak kekerasan.
 - **Seksi Kepahlawanan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan, pelayanan dan

penyelenggaraan kegiatan kepahlawanan dan pengelolaan sumber dana jaminan sosial.

1.3 Isu Strategis

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait dengan isu strategis penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah potensi dan kemampuan yang ada dalam masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alami, yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani dan mencegah timbul dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jenis PSKS terdiri dari : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), Penyuluh Sosial, Karang Taruna, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan bidang sosial diuraikan sebagai berikut :

1. Angka kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 sesuai data dari BPS Kalsel adalah sebesar 6,67%. Angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 sebesar 4,76%;
2. Belum optimalnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial;

3. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat, maka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan;
4. Adanya pergeseran-pergeseran norma yang terus terjadi dimasyarakat dapat melunturkan rasa patriotisme, semangat juang, semangat kepahlawanan dan menghargai para pejuang, oleh karena itu nilai-nilai kepahlawanan perlu terus dilestarikan;
5. Pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial masih perlu lebih ditingkatkan menuju pelayanan prima.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Th. 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 11 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2014-2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
11. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.1 Perencanaan Strategis

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, suatu organisasi mempunyai kewajiban untuk menyusun perencanaan strategis yang merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Di dalam suatu perencanaan strategis terdapat visi dan misi organisasi yang akan dicapai dalam suatu periode. Adapun visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1) Visi

“Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan bidang sosial”

2) Misi

1. Meningkatkan pemberdayaan sosial dan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
3. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan.

3) Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam perencanaan 5 (lima) tahun mendatang mempunyai orientasi pada upaya peningkatan pembangunan dibidang Sosial yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin;
2. Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatkan perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;

4. Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas;
5. Meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
6. Meningkatkan perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);
7. Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
8. Meningkatkan kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
9. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
10. Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

b. Sasaran

Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bagian integral dalam proses pencapaian visi misi dinas. Adapun sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin;
2. Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar;
4. Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas;
5. Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);
6. Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS);
7. Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam;
8. Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan;
9. Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan;
10. Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

Hubungan antara tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hubungan Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya
2	Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS
3	Meningkatkan perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya
4	Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri
5	Meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Persentase Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya
6	Meningkatkan perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku
7	Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari
8	Meningkatkan kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan	Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	2	3	4
9	Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran
			Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik
10	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti
			Indikator nilai hasil evaluasi AKIP
			Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti

4) Strategi dan Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian visi dan misi. Strategi Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mengaktualisasikan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara komprehensif guna mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
2. Melaksanakan peningkatan kualitas dan peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Usaha Kesejahteraan Sosial;
3. Melaksanakan pelayanan sosial dan pemberian bantuan atau jaminan sosial bagi anak dan lanjut usia terlantar;
4. Melaksanakan pelayanan sosial dan pemberian bantuan bagi penyandang disabilitas;
5. Melaksanakan pelayanan sosial dan bantuan sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE);

6. Melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS jalanan/tuna sosial lainnya;
7. Melaksanakan pemberian bantuan sosial bagi korban bencana alam;
8. Melaksanakan pelayanan sosial bagi korban tindak kekerasan;
9. Penanaman nilai-nilai kepahlawanan;
10. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang sosial.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Dinas Sosial untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

1. Menyelenggarakan pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin melalui pemberian modal usaha dan pendampingan;
2. Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra);
3. Fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni;
4. Pembinaan kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
5. Pembinaan terhadap anak terlantar/putus sekolah melalui pengiriman anak terlantar/putus sekolah ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) serta pemberian modal usaha;
6. Pemberian bantuan sosial kepada anak yatim dari keluarga miskin;
7. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar;
8. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas;
9. Pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;
10. Penertiban, pembinaan dan pemulangan PMKS jalanan/tuna sosial lainnya;
11. Pemberian bantuan sosial kepada korban bencana alam;
12. Pembinaan relawan sosial penanggulangan bencana (TAGANA);

13. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi korban tindak kekerasan;
14. Peringatan hari-hari bersejarah nasional;
15. Pemberian santunan kepada veteran dan janda veteran;
16. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan;
17. Pemenuhan SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang baik untuk fasilitasi pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial.

Secara ringkas Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan bidang sosial.			
MISI I : Meningkatkan pemberdayaan sosial dan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	Melaksanakan pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan	1. Pemberdayaan sosial bagi keluarga miskin melalui pemberian modal usaha dan pendampingan; 2. Penyaluran Beras Sejahtera; 3. Fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni.
Meningkatkan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Melaksanakan peningkatan kualitas dan peran aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam usaha kesejahteraan sosial	Pembinaan kepada Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

VISI : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan bidang sosial.			
MISI II : Meningkatkan pelayanan dan perlindungan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Melaksanakan pelayanan sosial dan pemberian bantuan atau jaminan sosial bagi anak dan lanjut usia terlantar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan terhadap anak terlantar/putus sekolah melalui pengiriman anak terlantar/putus sekolah ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) serta pemberian modal usaha; 2. Pemberian bantuan sosial kepada anak yatim dari keluarga miskin; 3. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar lanjut usia terlantar.
Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas	Melaksanakan pelayanan sosial dan pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas	Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas
Meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Melaksanakan pelayanan sosial dan pemberian bantuan sosial kepada perempuan rawan sosial ekonomi	Pembinaan dan pemberdayaan sosial bagi perempuan rawan sosial ekonomi

Meningkatkan perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Melaksanakan pelayanan sosial bagi PMKS jalanan / Tuna Sosial lainnya	Penertiban, pembinaan dan pemulangan PMKS jalanan/tuna sosial lainnya
Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Melaksanakan pemberian bantuan sosial kepada korban bencana alam	1. Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar korban bencana alam; 2. Pembinaan relawan sosial penanggulangan bencana (TAGANA)
Meningkatkan kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan	Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan	Melaksanakan pelayanan sosial bagi korban tindak kekerasan	Pemenuhan sebagian kebutuhan dasar korban tindak kekerasan
Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan di bidang social	Pemenuhan SDM yang kompeten dan sarana prasarana yang baik untuk fasilitasi pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial

VISI : Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pembangunan bidang sosial.

MISI III : Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan	1. Peringatan hari-hari bersejarah nasional; 2. Pemberian santunan kepada veteran dan janda veteran; 3. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

5) Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran, terdiri dari kegiatan :

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Kegiatan penyediaan jasa tanaga pendukung administrasi/teknis lainnya
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan :

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari kegiatan :

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, terdiri dari kegiatan :

- Pendampingan usaha bagi keluarga miskin
- Penyaluran pangan bagi masyarakat miskin
- Penyediaan program rumah sejahtera
- Pendukung Program Keluarga Harapan (PKH)

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :

- Pelayanan sosial bagi lanjut usia miskin dan terlantar
- Perlindungan sosial bagi korban bencana
- Pelayanan sosial bagi anak terlantar

6. Program Pembinaan Anak Terlantar, terdiri dari kegiatan :

- Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar

7. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma, terdiri dari kegiatan :

- Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

8. Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PKS, narkoba dan penyandang penyakit sosial lainnya, terdiri dari kegiatan :

- Peningkatan pelayanan sosial bagi eks panyandang penyakit

sosial dan masyarakat terlantar

- Pemberdayaan sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi

9. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari kegiatan :

- Pembinaan kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan
- Pembinaan Karang Taruna
- Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
- Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
- Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)
- Pembinaan Organisasi Sosial / Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA)
- Pembinaan Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat

10. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, terdiri dari kegiatan :

- Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat Desa

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra. Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3**Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	Keluarga miskin merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapat perhatian. Intervensi Dinas Sosial melalui pendampingan usaha, beras gratis dan rehab rumah tidak layak huni	Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya dibagi Jumlah total keluarga miskin x 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial	Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT)
2	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	Partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sangat diperlukan guna membantu penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS dibagi jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada x 100%	Bidang Pemberdayaan Sosial	Data Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
3	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	Anak terlantar merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapat perhatian	Jumlah anak terlantar yang ditangani dibagi jumlah anak terlantar yang seharusnya ditangani x 100%	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	Lanjut usia terlantar merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapat perhatian	Jumlah lanjut usia terlantar yang ditangani dibagi jumlah lanjut usia terlantar yang seharusnya ditangani x 100%	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	Penyandang disabilitas merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapat perhatian	Jumlah penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri dibagi Jumlah penyandang disabilitas yang terdata x 100%	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
5	Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	Perempuan rawan sosial ekonomi merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapat perhatian	Jumlah PRSE yang mengalami perubahan perilaku dibagi jumlah PRSE yang terdata x 100%	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
6	Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku	Keberadaan gelandangan dan pengemis mengganggu ketertiban lingkungan	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku dibagi Jumlah gelandangan dan pengemis yang terdata x 100%	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	Keberadaan wanita tuna susila mengganggu ketertiban lingkungan	Jumlah Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku dibagi Jumlah total Wanita Tuna Susila yang terdata x 100%	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
7	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	Korban bencana alam merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapat perhatian	Jumlah korban bencana alam yang menerima bantuan kurang dari 3 hari dibagi Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan x 100%	Bidang Perlindungan Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
8	Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya	Korban tindak kekerasan merupakan salah satu jenis PMKS yang perlu mendapat perhatian	Jumlah korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya dibagi Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan sosial x 100%	Bidang Perlindungan Sosial	Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
9	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	Sebagai bentuk penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya	Jumlah veteran dan janda veteran yang telah terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah veteran dan janda veteran yang ada x 100%	Bidang Perlindungan Sosial	Data veteran dan janda veteran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi / Penjelasan	Penanggung jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	Sebagai bentuk penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya	Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik dibagi jumlah Taman Makam Pahlawan yang ada x 100%	Bidang Perlindungan Sosial	
10	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Untuk meningkatkan kinerja aparatur	Rata-rata nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Rumah Biru Sehati Dissos Kab. HSS	Sekretariat	Data Survei Kepuasan Masyarakat
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Untuk lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100%	Sekretariat	Data pengaduan layanan
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	Sebagai salah satu hasil kinerja SKPD	Hasil penilaian AKIP	Sekretariat	
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Dalam rangka pembenahan administrasi program dan keuangan pada SKPD	Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan yang masuk x 100%	Sekretariat	

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Berdasarkan perencanaan strategis terkait sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang harus dicapai, maka pada Tahun 2018 target pencapaian kinerja yang ingin dicapai sebagai berikut :

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	85,81%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pendampingan Usaha Bagi Keluarga Miskin	56.362.880
					Penyaluran Pangan Bagi masyarakat Miskin	279.134.900
					Penyediaan Program Rumah Sejahtera	153.106.000
2	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	79,39%	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	18.910.000
					Pembinaa Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.132.080
					Pembinaan Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat	6.800.000
					Pembinaan Karang Taruna	139.663.520

					Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	3.100.000
					Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	190.926.000
					Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	148.004.000
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	4.342.640.000
3	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Sosial bagi anak terlantar	82.505.760
				Program Pembinaan Anak Terlantar	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	122.260.000
		Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia miskin dan terlantar	115.622.880
4	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	10%	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	154.853.440
5	Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	40%	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	69.992.640
6	Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku	21,27%		Peningkatan pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar	111.050.000
		Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	20%			
7	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan	100%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Perlindungan sosial bagi korban bencana	477.936.880

	bencana alam	dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari				
8	Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya	50%			
9	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	100%	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan	184.162.000
		Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	100%		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	51.500.000
10	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	3.070.000
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100%		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.602.000
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	16.250.000
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%		Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	11.000.000
					Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.050.000
					Penyediaan alat tulis kantor	49.295.500
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.103.210
					Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	3.409.000
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56.160.000
					Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000

				Penyediaan makanan dan minuman	17.540.000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	313.000.000
				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	81.850.000
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	54.000.000
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	86.360.000
				Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	71.500.000
				Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	82.400.000
			Peningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	5.059.920

Laporan tahapan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2018 disusun dengan mengukur capaian kinerja atas sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja ini. Metode pengukuran yang dilaksanakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi, serta tindakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang (*performance improvement*). Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi telah mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur keberhasilan kinerja sasaran, indikator yang dipakai dapat berupa indikator absolut di mana indikator tersebut melekat pada masing-masing kegiatan yaitu : indikator kinerja *input*, indikator kinerja *output* dan indikator kinerja *outcome*, atau merupakan dampak makro (*outcomes, benefit, impact*) dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Capaian kinerja sasaran diukur dengan membandingkan capaian kinerja *outcome* yang dihasilkan dengan rencana pada masing-masing kegiatan yang dianggap sebagai penggerak kinerja indikator sasaran.

Indikator kinerja *input* terdiri dari besarnya dana yang digunakan dan pemakaian SDM. Indikator kinerja *output* berupa hasil yang diperoleh begitu kegiatan selesai dilaksanakan. Sedangkan indikator kinerja *outcome* berupa manfaat yang diperoleh dari berfungsinya *output* yang dapat di ukur dalam jangka pendek.

3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) cenderung lebih dititikberatkan sejauh mana program dan kegiatan telah membawa manfaat bagi masyarakat, Pemerintah maupun *stakeholder* lainnya,

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian IKU pada Dinas Sosial Kab. Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian IKU Pada Triwulan I Tahun Anggaran 2018

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	REALISASI	CAPAIAN %
1	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	85,81	77,74	90,59
2	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	%	79,39	74,83	94,26
3	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	%	90	2,86	3,18
4	Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	%	90	0	0
5	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	%	10	7,30	73
6	Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	%	40	27,50	68,75
7	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku	%	21,27	19,15	90,03
8	Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	%	20	0	0
9	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	%	100	100	100
10	Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya	%	50	0	0
11	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	%	100	0	0
12	Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	%	100	0	0
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81	0	0
14	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100
15	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	A	-	-
16	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100

3.2 Pengukuran

Tabel 3.2

Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan Indikator	Formulasi
1	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya dibagi Jumlah total keluarga miskin x 100%	$\frac{17.120}{22.021} \times 100\%$
2	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS dibagi jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada x 100%	$\frac{226}{302} \times 100\%$
3	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	Jumlah anak terlantar yang ditangani dibagi jumlah anak terlantar yang seharusnya ditangani x 100%	$\frac{32}{1.117} \times 100\%$
4	Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	Jumlah lanjut usia terlantar yang ditangani dibagi jumlah lanjut usia terlantar yang seharusnya ditangani x 100%	$\frac{0}{2.794} \times 100\%$
5	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	Jumlah penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri dibagi Jumlah penyandang disabilitas yang terdata x 100%	$\frac{24+36+10}{959} \times 100\%$
6	Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	Jumlah PRSE yang mengalami perubahan perilaku dibagi jumlah PRSE yang terdata x 100%	$\frac{40+60+10}{400} \times 100\%$
7	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku dibagi Jumlah gelandangan dan pengemis yang terdata x 100%	$\frac{9}{47} \times 100\%$
8	Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	Jumlah Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku dibagi Jumlah total Wanita Tuna Susila yang terdata x 100%	$\frac{0}{4} \times 100\%$
9	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	Jumlah korban bencana alam yang menerima bantuan kurang dari 3 hari dibagi Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan x 100%	$\frac{77}{77} \times 100\%$
10	Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya	Jumlah korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya dibagi Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan sosial x 100%	$\frac{0}{0} \times 100\%$

11	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	Jumlah veteran dan janda veteran yang telah terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya dibagi Jumlah veteran dan janda veteran yang ada x 100%	$\frac{0}{96} \times 100\%$
12	Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik dibagi jumlah Taman Makam Pahlawan yang ada x 100%	$\frac{0}{1} \times 100\%$
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rata-rata nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Rumah Biru Sehati Dissos Kab. HSS	Belum dilaksanakan survey kepuasan Masyarakat Tahun 2018
14	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk x 100%	$\frac{8}{8} \times 100\%$
15	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	Hasil penilaian AKIP	Belum dilaksanakan penilaian Laporan AKIP Tahun 2018
16	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan yang masuk x 100%	$\frac{1}{1} \times 100\%$

3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir tahapan capaian Perjanjian Kinerja (PK) Triwulan I Tahun 2018, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Namun pengukuran itu saja tidak cukup tanpa tahu apa deskripsi dari semua kondisi itu, kondisi-kondisi tersebut perlu dianalisis dari pengukuran capaian pelaksanaan pembangunan agar dapat diketahui hubungan permasalahannya untuk diidentifikasi sebagai sebab akibat berupa faktor-faktor yang

mempengaruhinya, mana yang menjadi hambatan dan kendala untuk dijadikan *feed back* bagi perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada putaran atau periode waktu berikutnya.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Triwulan I Tahun Anggaran 2017 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.) **SASARAN STRATEGIS 1** **Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin**

Tabel 3.3

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW I	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	85,81	77,74	90,59	Belum Tercapai
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0ffe0;"> $\frac{\text{Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya}}{\text{Jumlah total keluarga miskin}} \times 100 \%$ </div> <div style="font-size: 2em; color: blue;">➔</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; background-color: #e0ffe0;"> $\frac{17.120 \times 100\%}{22.021}$ </div> </div>						

Pencapaian sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin dilihat dari indikator kinerja sasaran persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya.

Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya sebanyak 17.120 KK terdiri dari :

1. Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan usaha ekonomis produktif (UEP) dan mampu melaksanakannya dari tahun 2014 sampai dengan 2017 sebanyak 255 KK (Tahun 2014 = 34 KK, Tahun 2015 = 82 KK, Tahun 2016 = 47 KK, Tahun 2017 = 92 KK). Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan keluarga miskin. Pada Triwulan I Tahun 2018 ini kegiatan belum dapat dilaksanakan, dana Bansos untuk UEP belum dapat dicairkan karena SK Penerima Bansos masih dalam proses oleh Badan Keuangan Daerah Kab. HSS;
2. Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan beras sejahtera sesuai dengan peruntukannya secara gratis diberikan setiap bulan sebanyak 13.834 KK.

3. Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari tahun 2014 sampai dengan 2017 sebanyak 3.031 KK (Tahun 2014 = 676 buah, Tahun 2015 = 745 buah, Tahun 2016 = 849 buah, Tahun 2017 = 761 buah). Pendanaan bersumber dari APBD Kab. HSS. Pada Triwulan I Tahun 2018 ini dana Bansos untuk rehabilitasi rumah tidak layak huni belum dapat dicairkan karenamenyesuaikan jadwal pencairan dari Badan Keuangan Daerah Kab. HSS.

Jumlah total keluarga miskin berdasarkan pemutakhiran basis data terpadu (PBDT) sebanyak 22.021 KK.

Realisasi capaian kinerja pada TW I yaitu 77,74%, sedangkan targetnya 85,81%, sehingga target belum tercapai dikarenakan ada beberapa kegiatan yang belum dapat dilaksanakan terkait dengan dana Bansos yang masih belum dapat dicairkan. Data kinerja yang tersaji dalam tabel di atas dapat di lihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.1

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 dibandingkan Dengan Target



Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Lalu

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI THN 2016	REALISASI THN 2017	REALISASI THN 2018 TW I	CAPAIAN KINERJA
Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	%	80,25 % (17.674 KK)	77,15% (16.989 KK)	77,74% (17.120 KK)	Naik

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Dukungan sumber daya manusia yang potensial;
- Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Relawan Sosial dan Dunia Usaha yang turut mendukung program pemberdayaan sosial;
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai;
- Adanya motivasi dan keinginan masyarakat penerima program/kegiatan untuk berubah menjadi lebih baik.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Proses seleksi, verifikasi dan validasi untuk menentukan individu atau keluarga yang layak menerima program-program pemberdayaan sosial memerlukan waktu yang cukup lama;
- Regulasi atau prosedur pemberian program-program pemberdayaan sosial pada skala nasional dan daerah yang berubah-ubah;
- Kemampuan dari penerima manfaat dalam melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan sosial yang diterima masih rendah;
- Masih kurangnya cakupan program/kegiatan pemberdayaan sosial dalam mengintervensi pemberdayaan sosial masyarakat miskin yang ada.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melakukan koordinasi lintas sektoral;
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam proses pembangunan bidang sosial;
- Memberikan pendampingan kepada masyarakat miskin penerima program pemberdayaan sosial;
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5**Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1**

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		
	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan usaha ekonomis produktif (UEP)	- Pendampingan Usaha Bagi Keluarga Miskin	56.362.880	0
	Jumlah KK dalam eks Komunitas Adat Terpencil yang mendapat bantuan UEP			
	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang mendapatkan bantuan beras sejahtera	- Penyaluran Pangan Bagi masyarakat Miskin	279.134.900	10.044.400
Jumlah rumah keluarga miskin tidak layak huni yang direhabilitasi	- Penyediaan Program Rumah Sejahtera	153.106.000	2.680.000	
J U M L A H			488.603.780	12.724.400

Dokumentasi Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 1

Bupati Kab. HSS menyerahkan secara simbolis bantuan usaha ekonomis produktif (UEP) kepada penerima bantuan



Bupati Kab. HSS menyerahkan bantuan Beras Sejahtera gratis kepada masyarakat miskin



Rumah tidak layak huni yang telah mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui Program Rumah Sejahtera

2.) **SASARAN STRATEGIS 2** Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Tabel 3.6

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW I	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	%	79,39	74,83	94,26	Belum Tercapai
$\frac{\text{Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS}}{\text{Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada}} \times 100\%$						$\frac{226}{302} \times 100\%$

Pencapaian sasaran strategis 2 yaitu Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dilihat dari indikator kinerja sasaran Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS.

Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS sebanyak terdiri dari :

1. Lembaga/organisasi sosial yang aktif yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) 16 buah, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1 buah, Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan

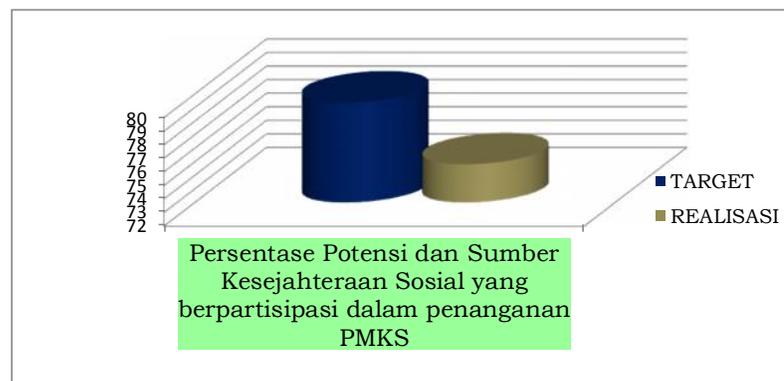
Sosial 1 buah, Karang Taruna 20 buah, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) 5 buah;

2. Relawan sosial yang aktif yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) 20 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 11 orang, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial 4 orang dan Sarjana Pendamping Desa Sejahtera 148 orang.

Realisasi capaian kinerja pada TW I yaitu 74,83%, sedangkan targetnya 79,39%, sehingga target belum tercapai dikarenakan belum terlaksananya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Data kinerja yang tersaji dalam tabel di atas dapat di lihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 dibandingkan Dengan Target



Dalam rangka meningkatkan kinerja atau peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS, Dinas Sosial Kab. HSS telah melaksanakan berbagai kegiatan diantaranya, bimbingan teknis bagi PSKS, pemantapan koordinasi melalui pertemuan/rapat, pemberian insentif tambahan bagi TKSK, PSM dan pengurus LK3, serta lomba untuk organisasi sosial, TKSK dan PSM untuk meningkatkan prestasi.

Tabel 3.7

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Lalu

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI THN 2016	REALISASI THN 2017	REALISASI THN 2018 TW I	CAPAIAN KINERJA
Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	%	45,27 % (67 PSKS)	52,02 % (77 PSKS)	74,83 % (226 PSKS)	Naik

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Relawan Sosial yang mendukung upaya penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Masih ada beberapa PSKS yang belum kompeten di bidangnya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Perlu terus melaksanakan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan/kompetensi terkait bidang tugas serta pembekalan mengenai etika birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi masyarakat;
- Melaksanakan lomba untuk PSKS guna memberikan motivasi dan semangat agar terus berprestasi.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah lembaga sosial yang aktif	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
		- Pembinaan Organisasi Sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	18.910.000	0
		- Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.132.080	0
		- Pembinaan Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat	6.800.000	0

	Jumlah organisasi sosial yang aktif	Pembinaan Karang Taruna	139.663.520	0
	Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang aktif	Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	3.100.000	0
	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang aktif	Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	190.926.000	49.250.000
	Jumlah Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial yang aktif		-	
	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang aktif	Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	148.004.000	36.630.000
		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		
	Jumlah Sarjana Pendamping Desa Sejahtera yang aktif	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	4.342.640.000	709.015.000
J U M L A H			4.873.175.600	794.895.000

Dokumentasi Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 2



Rapat koordinasi dan pembinaan terhadap TKSK yang ada pada 11 Kecamatan di Kab. HSS



Bimtek aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Data PMKS dan PSKS kepada TKSK yang ada pada 11 Kecamatan

3.) **SASARAN STRATEGIS 3** Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar

Tabel 3.9

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW I	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	%	90	2,86	3,18	Belum Tercapai
2	Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	%	90	0	0	Belum Tercapai

$$\frac{\text{Jumlah anak terlantar yang ditangani}}{\text{Jumlah anak terlantar yang seharusnya ditangani}} \times 100\%$$

➔

$$\frac{32}{1.117} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar yang ditangani}}{\text{Jumlah lanjut usia terlantar yang seharusnya ditangani}} \times 100\%$$

➔

$$\frac{0}{2.794} \times 100\%$$

Pencapaian sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya.

Yang dimaksud dengan anak terlantar ialah anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
- b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Jumlah anak terlantar yang ditangani sebanyak 32 orang yaitu:

1. Fasilitasi pembinaan untuk 20 orang anak di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan bantuan barang modal usaha;
2. Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) untuk 11 orang anak; dan

3. Pelayanan kasus adopsi anak ada 1 kasus.

Untuk Tahun 2018 ini target jumlah anak terlantar yang ditangani sebanyak 1.117 orang.

Realisasi capaian kinerja pada TW I yaitu 2,86%, sedangkan targetnya 90%, sehingga target belum tercapai dikarenakan belum terlaksananya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. HSS guna mendorong pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi anak terlantar antara lain :

1. Fasilitasi Penyerahan Bansos Program BERUPAYA (Bersama Peduli Anak Yatim) dan PKSA (Program Kesejahteraan Sosial Anak) kepada anak dari keluarga miskin. Pada Triwulan I Tahun 2018 ini belum dilaksanakan. Penyaluran Bansos untuk anak terlantar akan dilaksanakan pada triwulan III;
 2. Pembinaan terhadap anak terlantar melalui pengiriman ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) di Banjarbaru dan pemberian bantuan peralatan modal usaha setelah selesai mengikuti pembinaan bakat dan keterampilan sesuai dengan jurusan yang diikuti terdiri dari : bahan dan peralatan menjahit, tata rias, service hp, service sepeda motor, kelengkapan/peralatan komputer, kelengkapan/peralatan otomotif, peralatan usaha meubel aluminium;
 3. Bantuan perlengkapan sekolah kepada anak terlantar pada peringatan Hari Anak Nasional;
 4. Pelayanan terhadap kasus anak terkait adopsi dan advokasi.
2. Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya.

Yang dimaksud dengan Lanjut Usia Terlantar ialah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan;
- b. terlantar secara psikis, dan sosial.

Pada TW I belum ada lanjut usia terlantar yang ditangani. Sedangkan target jumlah lanjut usia terlantar yang ditangani sebanyak 2.794 orang.

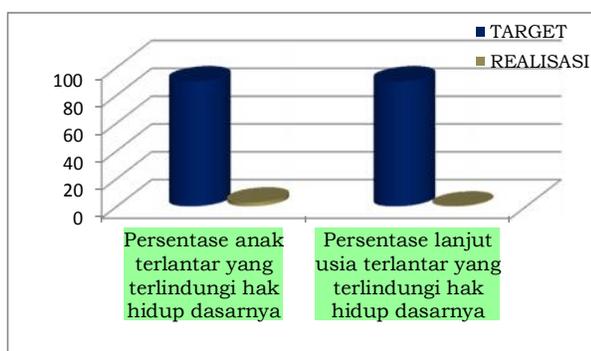
Realisasi capaian kinerja pada TW I yaitu 0%, sedangkan targetnya 90%, sehingga target belum tercapai dikarenakan belum terlaksananya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. HSS guna mendorong pemenuhan sebagian kebutuhan dasar bagi anak terlantar antara lain :

1. Fasilitasi Penyerahan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dan bantuan bahan pangan (sembako) kepada lanjut usia terlantar. Pada Triwulan I Tahun 2018 ini belum dilaksanakan. Penyaluran Bantuan Sosial untuk lansia terlantar akan dilaksanakan pada triwulan II.
2. Bantuan bahan sandang/pakaian kepada lanjut usia pada peringatan Hari Lanjut Usia. Pada Triwulan I Tahun 2018 ini belum dilaksanakan.

Grafik 3.3

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 dibandingkan Dengan Target



Tabel 3.10

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Lalu

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI THN 2016	REALISASI THN 2017	REALISASI THN 2018 TW I	CAPAIAN KINERJA
Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	%	90 % (1.136 Orang)	111% (819 Orang)	2,86 % (32 Orang)	Turun

Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	%	90 % (2.070 Orang)	111% (2.171 Orang)	0	Turun
--	---	--------------------------	--------------------------	---	-------

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Relawan Sosial yang mendukung upaya penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial;
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Proses seleksi, verifikasi dan validasi untuk menentukan individu penerima bantuan sosial memerlukan waktu yang cukup lama;
- Prosedur pemberian bantuan sosial yang selektif;
- Ketergantungan terhadap bantuan sosial yang diberikan masih tinggi;
- Masih kurangnya cakupan program/kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar anak dan lanjut usia terlantar.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melakukan koordinasi lintas sektoral;
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam proses pembangunan bidang sosial;
- Memberikan pendampingan kepada penerima program bantuan sosial;
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 3 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
	Jumlah anak yang	Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar	82.505.760	4.600.000

anak dan lanjut usia terlantar	mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar	Program Pembinaan Anak Terlantar		
		Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	122.260.000	71.000.000
		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar lanjut usia terlantar sesuai dengan standar	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia miskin dan terlantar	115.622.880	288.000
J U M L A H			320.388.640	75.888.000

Dokumentasi Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 3



Penyerahan bantuan bahan pangan (sembako) oleh Bupati HSS kepada lanjut usia terlantar



Penyerahan bantuan Jaminan Hidup (Jadup) oleh Bupati HSS kepada lanjut usia terlantar



Penyaluran Bansos Program Bersama untuk Peduli Anak Yatim (BERUPAYA) dan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA)



Penyerahan bansos BERUPAYA dan PKSA oleh Bupati HSS kepada anak yatim/terlantar dari keluarga miskin

4.) **SASARAN STRATEGIS 4** Meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas

Tabel 3.12

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW I	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	%	10	7,30	73	Belum Tercapai
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e0ffe0;"> $\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri}}{\text{Jumlah penyandang disabilitas yang terdata}} \times 100\%$ </div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 10px; padding: 5px; background-color: #e0ffe0;"> $\frac{24+36+10}{959} \times 100\%$ </div> </div>						

Pencapaian sasaran strategis 4 yaitu Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas dilihat dari indikator kinerja sasaran persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri. Kriteria yang digunakan ialah jumlah penyandang disabilitas yang dianggap sudah tidak memerlukan bantuan orang lain baik untuk bergerak maupun dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

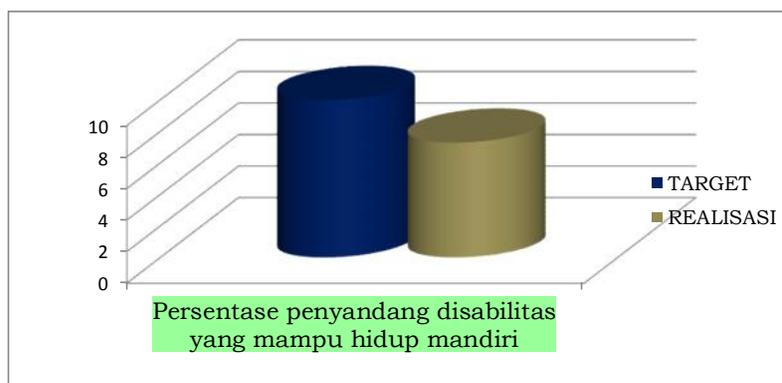
Jumlah penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri sampai dengan tahun 2017 berjumlah 60 orang (Tahun 2016 = 24 orang, Tahun 2017 = 36 Orang) dan untuk TW I Tahun 2018 bertambah sebanyak 10 orang menjadi 70 orang, sedangkan jumlah penyandang disabilitas yang terdata sebanyak 959 orang.

Penyandang disabilitas yang mengikuti Praktek Belajar Kerja (PBK) sebanyak 10 orang.

Realisasi capaian kinerja pada TW I yaitu 7,30%, sedangkan targetnya 10%, sehingga target belum tercapai dikarenakan belum terlaksananya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Realisasi capaian kinerja dapat dilihat dari grafik di bawah ini :

Grafik 3.4

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 dibandingkan Dengan Target



Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. HSS guna meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas antara lain :

1. Bantuan alat bantu tubuh kepada penyandang disabilitas dari keluarga miskin terdiri dari : kursi roda, tongkat ketiak/kruk, kaki palsu/prothese;
2. Pelatihan Praktek Belajar Kerja (PBK) bagi penyandang disabilitas dan bantuan barang modal usaha terdiri dari : bahan dan peralatan menjahit, bahan dan peralatan pijat, bahan dan peralatan service sepeda motor;
3. Pengiriman ke panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
4. Bantuan bahan pangan (sembako) kepada penyandang disabilitas.

Tabel 3.13

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Lalu

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI THN 2016	REALISASI THN 2017	REALISASI THN 2018 TW I	CAPAIAN KINERJA
Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	%	2,50 % (24 Orang)	6,25 % (60 Orang)	7,30 % (70 Orang)	Naik

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Relawan Sosial yang mendukung upaya penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial;
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Proses seleksi, verifikasi dan validasi untuk menentukan individu penerima bantuan sosial memerlukan waktu yang cukup lama;
- Prosedur pemberian bantuan sosial yang selektif;
- Ketergantungan terhadap bantuan sosial yang diberikan masih tinggi;
- Masih kurangnya cakupan program/kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar penyandang disabilitas dan untuk meningkatkan kemandirian hidup penyandang disabilitas.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melakukan koordinasi lintas sektoral;
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam proses pembangunan bidang sosial;
- Memberikan pendampingan kepada penerima program bantuan sosial;
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 4 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas		Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		
	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas sesuai dengan standar	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	154.853.440	39.851.440
J U M L A H			154.853.440	39.851.440

Dokumentasi Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 4



Penyerahan bantuan alat bantu tubuh kepada penyandang disabilitas



Penyerahan bantuan pangan (sembako) kepada penyandang disabilitas



Praktek Belajar Kerja bagi penyandang disabilitas

5.) **SASARAN STRATEGIS 5** Meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)

Tabel 3.15

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW I	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	%	40	27,50	68,75	Belum Tercapai
$\frac{\text{Jumlah PRSE yang meningkat kualitas hidupnya}}{\text{Jumlah PRSE yang terdata}} \times 100\%$					$\frac{40+60+10}{400} \times 100\%$	

Pencapaian sasaran strategis 5 yaitu Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) dilihat dari indikator kinerja sasaran jumlah PRSE yang meningkat kualitas hidupnya.

Yang dimaksud dengan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) ialah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan kriteria sebagai berikut :

- a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- c. menjadi pencari nafkah utama keluarga;
- d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

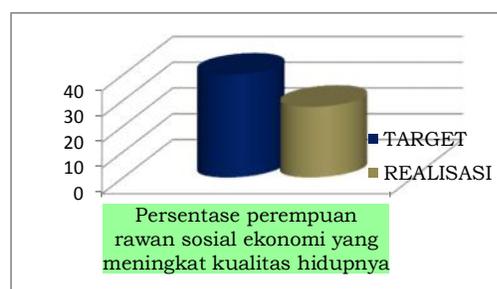
Jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) yang meningkat kualitas hidupnya sampai dengan tahun 2017 berjumlah 100 orang (Tahun 2016 = 40 Orang, Tahun 2017 = 60 Orang) dan untuk TW I Tahun 2018 bertambah sebanyak 10 orang menjadi 110 orang, sedangkan jumlah Perempuan Rawan Sosial Ekonomi yang terdata sebanyak 400 orang.

Pada Triwulan I Tahun 2018 ini, dilaksanakan pembinaan dan pelatihan keterampilan melalui pengiriman ke Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) sebanyak 10 orang.

Realisasi capaian kinerja pada TW I yaitu 27,50%, sedangkan targetnya 40%, sehingga target belum tercapai dikarenakan belum terlaksananya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Realisasi capaian kinerja dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.5

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5 dibandingkan Dengan Target



Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. HSS guna meningkatkan kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi antara lain :

1. Bimbingan kewirausahaan kepada perempuan rawan sosial ekonomi;
2. Pembinaan dan pelatihan keterampilan melalui pengiriman ke Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) dan pemberian bantuan peralatan modal usaha setelah selesai mengikuti pembinaan keterampilan sesuai dengan jurusan yang diikuti yang terdiri dari : Bahan dan peralatan tata rias, tata boga, tata busana/menjahit.

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 5 Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Lalu

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI THN 2016	REALISASI THN 2017	REALISASI THN 2018 TW I	CAPAIAN KINERJA
Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	%	10 % (40 Orang)	60 % (100 Orang)	27,50 % (110 Orang)	Naik

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- 1.) Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Relawan Sosial yang mendukung upaya penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial;
- 2.) Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Proses seleksi, verifikasi dan validasi untuk menentukan individu penerima bantuan sosial memerlukan waktu yang cukup lama;
- Prosedur pemberian bantuan sosial yang selektif;
- Ketergantungan terhadap bantuan sosial yang diberikan masih tinggi;
- Masih kurangnya cakupan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan rawan sosial ekonomi.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melakukan koordinasi lintas sektoral;

- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam proses pembangunan bidang sosial;
- Memberikan pendampingan kepada penerima program bantuan sosial;
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 5 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.17

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 5

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		
	Jumlah PRSE yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar	Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	69.992.640	38.650.000
J U M L A H			69.992.640	38.650.000

Dokumentasi Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 5



Pelatihan keterampilan bagi perempuan rawan sosial ekonomi

6.) **SASARAN STAREGIS 6** Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)

Tabel 3.18

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW I	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku	%	21,27	19,15	90,03	Belum Tercapai
2	Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	%	20	0	0	Belum Tercapai

$$\frac{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku}}{\text{Jumlah gelandangan dan pengemis yang terdata}} \times 100\% \rightarrow \frac{9}{47} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku}}{\text{Jumlah Wanita Tuna Susila yang terdata}} \times 100\% \rightarrow \frac{0}{4} \times 100\%$$

Pencapaian sasaran strategis 6 yaitu Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS) dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku

Dalam mengukur tingkat perubahan perilaku pada gelandangan dan pengemis kriteria yang digunakan ialah jumlah gelandangan dan pengemis yang beritikad untuk memperbaiki taraf hidupnya melalui cara yang lebih baik dengan tidak hidup menggelandang atau mengemis di jalanan.

Jumlah gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku pada TW I Tahun 2018 sebanyak 9 orang, sedangkan jumlah gelandangan dan pengemis yang terdata sebanyak 47 orang.

Realisasi capaian kinerja pada TW I yaitu 90,03%, sedangkan targetnya 21,27%, sehingga target belum tercapai dikarenakan belum terlaksananya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan masih kurangnya cakupan program/kegiatan dalam rangka peningkatan perubahan perilaku PMKS jalanan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. HSS dalam upaya mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis yang ada di jalanan antara lain penertiban gelandangan dan pengemis bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. HSS, penanganan terhadap masyarakat terlantar dan penyandang penyakit sosial berupa pemulangan ke daerah asalnya.

2. Persentase Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku

Dalam mengukur tingkat perubahan perilaku pada Wanita Tuna Susila, kriteria yang digunakan ialah Wanita Tuna Susila yang telah ditertibkan sehingga diasumsikan bahwa mereka yang telah menerima arahan tidak akan kembali melakukan perbuatan asusila.

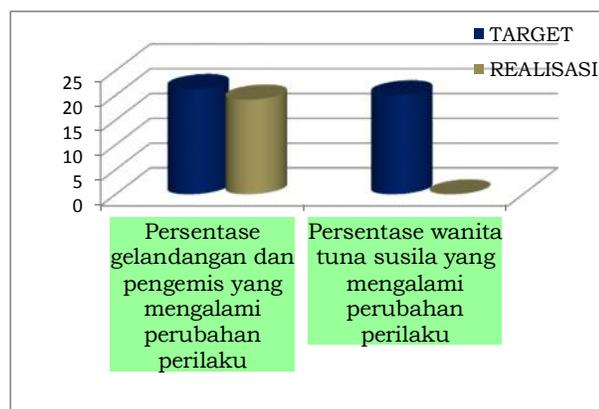
Pada TW I Tahun 2018 ini tidak ada Wanita Tuna Susila yang ditertibkan dan Jumlah Wanita Tuna Susila yang terdata sebelumnya sebanyak 5 orang.

Realisasi capaian kinerja pada TW I yaitu 0%, sedangkan targetnya 20%, sehingga target belum tercapai.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan guna menunjang pencapaian indikator tersebut yaitu penertiban Wanita Tuna Susila bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. HSS.

Grafik 3.6

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6 dibandingkan Dengan Target



Tabel 3.19

**Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 6 Tahun Ini
dengan Tahun-Tahun Lalu**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI THN 2016	REALISASI THN 2017	REALISASI THN 2018 TW I	CAPAIAN KINERJA
Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku	%	10,63 % (5 Orang)	57,45 % (27 Orang)	19,15 (9 Orang)	Turun
Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	%	20 % (1 Orang)	20 % (1 Orang)	0 %	Turun

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- 1) Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Relawan Sosial yang mendukung upaya penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial;
- 2) Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang tersedia belum dapat bekerja secara optimal untuk melakukan pendampingan terhadap penyandang penyakit sosial / PMKS jalanan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya;
- Ketergantungan terhadap bantuan sosial yang diberikan masih tinggi;
- Masih kurangnya cakupan program/kegiatan dalam rangka peningkatan perubahan perilaku PMKS jalanan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melakukan koordinasi lintas sektoral;
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam proses pembangunan bidang sosial;
- Memberikan pendampingan kepada penyandang penyakit sosial;
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 6 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 6

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		
	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar	Peningkatan pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar	111.050.000	12.725.000
	Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar			
	Persentase penyandang penyakit sosial lainnya dan masyarakat terlantar yang mendapat pelayanan sosial sesuai dengan standar			
J U M L A H			111.050.000	12.725.000

Dokumentasi Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 6



Penanganan gelandangan/pengemis dan masyarakat terlantar



Penanganan orang dengan gangguan jiwa



Penanganan mayat terlantar

7.) **SASARAN STRATEGIS 7** Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam

Tabel 3.21

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW 1	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	%	100	100	100	Tercapai

$$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam yang menerima bantuan kurang dari 3 hari}}{\text{Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan}} \times 100\%$$

$$\frac{77}{77} \times 100\%$$

Pencapaian sasaran strategis 7 yaitu Meningkatkan ketepatan waktu penanganan korban bencana alam dilihat dari indikator kinerja sasaran persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari.

Selama Triwulan I Tahun 2018 ini, terdapat 13 kejadian bencana dengan jumlah korban 24 KK/77 jiwa, yaitu :

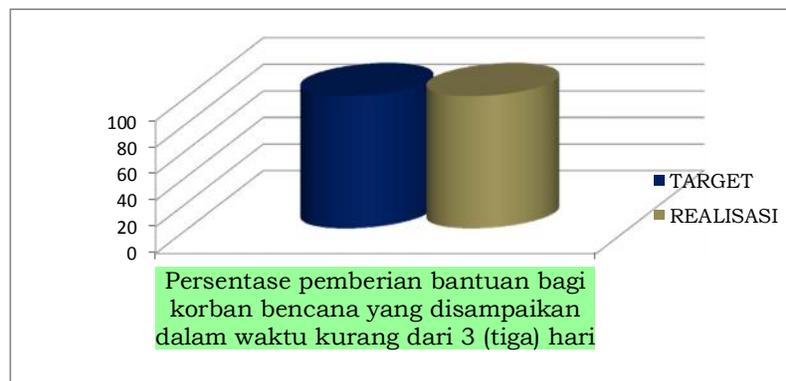
1. Kebakaran 7 kejadian, korban 7 KK/23 jiwa.
2. Pohon tumbang 5 kejadian, korban 9 KK /27 jiwa.
3. Puting beliung 1 kejadian, korban 8 KK/27 jiwa.

Berdasarkan hasil monitoring terhadap waktu penyampaian barang bantuan berupa pangan (sembako) dan peralatan dapur bagi

korban bencana diperoleh hasil bahwa tidak terjadi keterlambatan atas penyampaian barang bantuan bagi korban bencana atau dengan kata lain Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari pada Tahun 2018 TW I mencapai 100%, dari target 100%, sehingga target tercapai.

Grafik 3.7

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7 dibandingkan Dengan Target



Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. HSS dalam upaya pemberian bantuan bagi korban bencana antara lain :

1. Pemantapan petugas Siaga Bencana dalam hal ini Taruna Siaga Bencana, piket posko kebencanaan di Markas Komando Tagana serta pemberian insentif bagi Taruna Siaga Bencana guna meningkatkan kinerja Taruna Siaga Bencana (Tagana);
2. Penyediaan barang bantuan bencana berupa pangan (sembako) dan peralatan dapur korban bencana;
3. Penyediaan sarana dan prasarana tanggap darurat bencana seperti sarana mobilitas roda 4 dan roda 2, fasilitas dapur umum, dan fasilitas evakuasi bencana.

Tabel 3.22

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 7 Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Lalu

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI THN 2016	REALISASI THN 2017	REALISASI THN 2018 TW I	CAPAIAN KINERJA
Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	%	100% (861 Jiwa)	100 % (154 KK/ 496 Jiwa)	100% (24KK/ 77 Jiwa)	Tetap

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- 1.) Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yaitu anggota Tagana sebanyak 76 orang yang berperan aktif dalam penanggulangan bencana;
- 2.) Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Masih kurangnya cakupan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas perlindungan sosial korban bencana.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melakukan koordinasi lintas sektoral;
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam proses pembangunan bidang sosial;
- Memberikan pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan/kompetensi Tagana terkait bidang tugas terhadap penanggulangan dan perlindungan sosial korban bencana;
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data yang ada.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 7 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 7

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		
	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat korban bencana	Perlindungan sosial bagi korban bencana	477.936.880	59.140.000
	Jumlah relawan penanggulangan bencana (TAGANA) yang berperan aktif dalam penanggulangan bencana			
J U M L A H			477.936.880	59.140.000

Dokumentasi Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 7



Kegiatan Pemberian bantuan tanggap darurat untuk korban

8.) **SASARAN STRATEGIS 8** **Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan**

Tabel 3.24

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 8

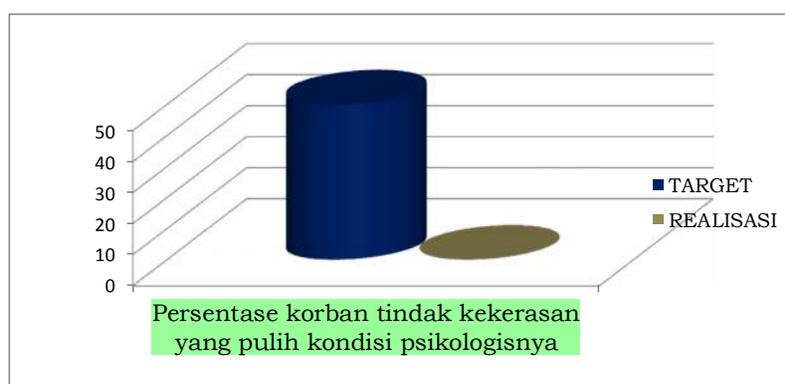
No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW I	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya	%	50	0	0	Belum Tercapai
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #e0ffe0; width: 60%;"> $\frac{\text{Jumlah korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya}}{\text{Jumlah korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan sosial}} \times 100\%$ </div> <div style="font-size: 2em; margin: 0 10px;">➔</div> <div style="border: 1px solid #add8e6; border-radius: 15px; padding: 10px; background-color: #e0ffe0; width: 20%; text-align: center;"> $\frac{0}{0} \times 100\%$ </div> </div>						

Pencapaian sasaran strategis 8 yaitu Meningkatkan kondisi pulih psikologis korban tindak dilihat dari persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya.

Pada Triwulan I Tahun 2018 ini, tidak ada laporan kasus tindak kekerasan yang masuk ke Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Grafik 3.8

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8 dibandingkan Dengan Target



Pada Dinas Sosial Kab. HSS memang tidak ada kegiatan khusus untuk penanganan korban tindak kekerasan. Akan tetapi jika ada laporan yang masuk ke Dinas Sosial Kab. HSS terkait hal tersebut maka tetap diberikan penanganan karena itu sudah menjadi salah satu tupoksi pada seksi tersebut. Penanganan korban tindak kekerasan dapat bekerjasama dengan SKPD terkait lainnya misalnya P2TP2A yaitu Pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, meliputi : pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi, pelayanan medis dan rumah aman/sheter dengan rujukan secara gratis.

Tabel 3.25

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 8 Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Lalu

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI THN 2016	REALISASI THN 2017	REALISASI THN 2018 TW I	CAPAIAN KINERJA
Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya	%	0 (tidak ada laporan tindak kekerasan)	0 (tidak ada laporan tindak kekerasan)	0 (tidak ada laporan tindak kekerasan)	Tetap

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Relawan Sosial yang mendukung upaya penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial dalam hal ini pendampingan terhadap korban kekerasan.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang tersedia belum dapat bekerja secara optimal untuk melakukan pendampingan terhadap korban tindak kekerasan untuk kondisi pulih psikologisnya dari segi kualitas;
- Masih kurangnya cakupan program/kegiatan dalam rangka pendampingan terhadap korban tindak kekerasan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melakukan koordinasi lintas sektoral;
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam proses pembangunan bidang sosial;
- Memberikan pendampingan kepada korban tindak kekerasan;
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data dan sumber daya yang ada.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 8 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.26

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 8

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan		(Tidak ada program khusus untuk penanganan korban tindak kekerasan)		
	Persentase korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan sosial	(Tidak ada kegiatan khusus untuk penanganan korban tindak kekerasan)	0	0
J U M L A H			0	0

9.) **SASARAN STRATEGIS 9** Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan

Tabel 3.27

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 9

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW I	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	%	100	0	0	Belum Tercapai
2	Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	%	100	0	0	Belum Tercapai

$$\frac{\text{Jumlah veteran dan janda veteran yang telah terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah veteran dan janda veteran yang ada}} \times 100\%$$

➔

$$\frac{0}{96} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik}}{\text{Jumlah Taman Makam Pahlawan yang ada}} \times 100\%$$

➔

$$\frac{0}{1} \times 100\%$$

Pencapaian sasaran strategis 9 yaitu Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dilihat dari 2 (dua) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran

Veteran dan janda veteran yang ada di Kab. HSS saat ini berjumlah 96 orang dikarenakan 8 orang meninggal dunia. Pada Triwulan I Tahun 2018 ini, target belum tercapai dikarenakan belum terlaksananya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. HSS guna pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran antara lain :

- a. Pemberian Santunan/bantuan sosial berupa tali asih sebesar Rp.500.000/orang/kali kepada veteran dan janda veteran yang diberikan 3 kali dalam setahun yaitu pada peringatan 17 Mei,

17 Agustus dan 10 November

- b. Fasilitasi untuk pemakaman veteran dan fasilitasi ziarah ke Makam tokoh/pahlawan.

2. Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik

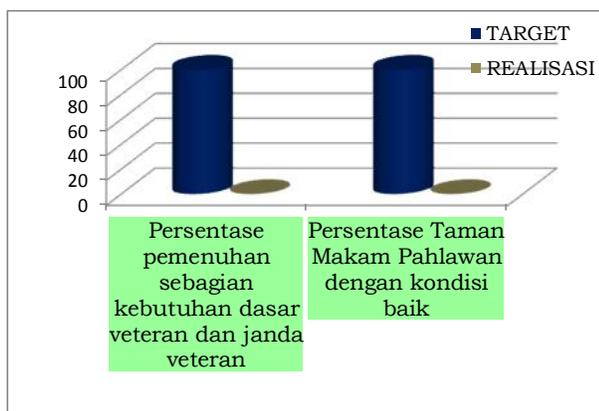
Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 1 Taman Makam Pahlawan yaitu Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Banua. Pada Triwulan I Tahun 2018 ini, target belum tercapai dikarenakan belum terlaksananya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kab. HSS guna tersedianya Taman Makam Pahlawan yang representatif antara lain :

- a. Fasilitasi pemeliharaan Taman Makam Pahlawan;
- b. Pengecatan Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Banua;
- c. Pemeliharaan instalasi listrik Taman Makam Pahlawan.

Grafik 3.9

Capaian Indikator Kinerja Sasaran 9 dibandingkan Dengan Target



Tabel 3.28

Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 9 Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Lalu

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI THN 2016	REALISASI THN 2017	REALISASI THN 2018 TW I	CAPAIAN KINERJA
Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	%	100 % (113 Orang)	100 % (101 Orang)	0	Turun
Persentase Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	%	100 % (1 Lokasi)	100 % (1 Lokasi)	0	Turun

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Ketersediaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial seperti Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Relawan Sosial yang mendukung upaya penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial;
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Masih kurangnya cakupan program/kegiatan dalam rangka pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Melakukan koordinasi lintas sektoral;
- Meningkatkan sinergisitas program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dalam proses pembangunan bidang sosial;
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data yang ada.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 9 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.29

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 9

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		
	Jumlah veteran dan janda veteran yang telah menerima santunan/ bantuan sosial	Pembinaan kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan	184.162.000	12.980.000
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	51.500.000	0
J U M L A H			235.662.000	12.980.000

Dokumentasi Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 7



Penyerahan bantuan sosial berupa tali asih oleh Bupati HSS kepada veteran dan janda veteran



Peringatan Hari Bersejarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Pusara Bhakti Banua

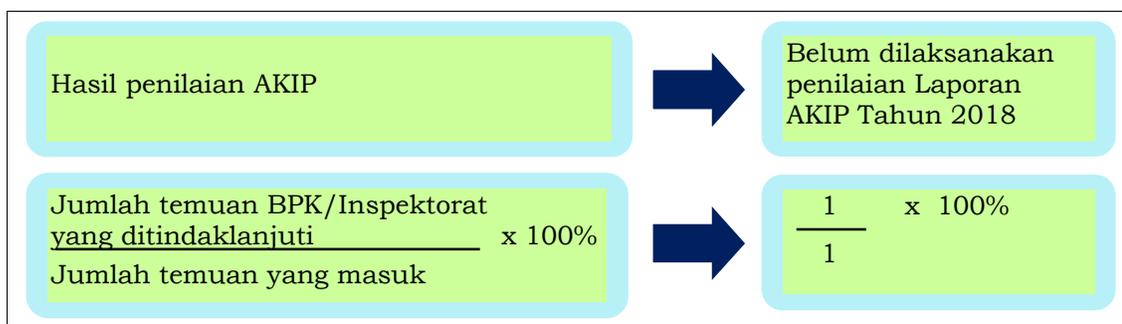
6.) **SASARAN STRATEGIS 10** Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja

Tabel 3.30

Formulasi Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis 10

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Tahun 2018	Realisasi TW I	Capaian Kinerja %	Catatan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81	0	0	Belum Tercapai
2	Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Tercapai
3	Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	A	-	-	Belum Tercapai
4	Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Tercapai

Rata-rata nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada Rumah Biru Sehati Dissos Kab. HSS		Belum dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018
$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang masuk}} \times 100\%$		$\frac{8}{8} \times 100\%$



Pencapaian sasaran strategis 10 yaitu Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja dilihat dari 4 (empat) indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat diukur melalui hasil Survei Kepuasan Masyarakat. Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini didapat dari hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pada Triwulan I Tahun 2018 belum dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 pada Pusat Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) "Rumah Biru Sehati" pada Dinas Sosial Kab. HSS.

Beberapa pelayanan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat antara lain :

- a. Pelayanan Program Rumah Sejahtera;
- b. Pelayanan bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP)/ Kelompok Usaha Bersama (KUBE);
- c. Pelayanan bantuan Beras Sejahtera Gratis;
- d. Pelayanan Rekomendasi pengurusan KIS/BPJS Kesehatan;
- e. Pelayanan bantuan Jaminan Hidup Lansia;
- f. Pelayanan bantuan untuk penyandang cacat;
- g. Pelayanan bantuan untuk anak yatim/anak terlantar;
- h. Pelayanan bantuan untuk masyarakat terlantar;
- i. Pelayanan bantuan untuk korban bencana;
- j. Pelayanan pengurusan izin pengelolaan sumbangan sosial;
- k. Pelayanan korban tindak kekerasan;
- l. Pelayanan terhadap veteran/janda veteran.

2. Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti

Pada Triwulan I Tahun 2018 ada 8 pengaduan masyarakat tentang permasalahan sosial yang ditindaklanjuti dari 8 pengaduan yang masuk baik pengaduan melalui Pusat Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) "Rumah Biru Sehati" pada Dinas Sosial Kab. HSS atau call center telepon/sms.

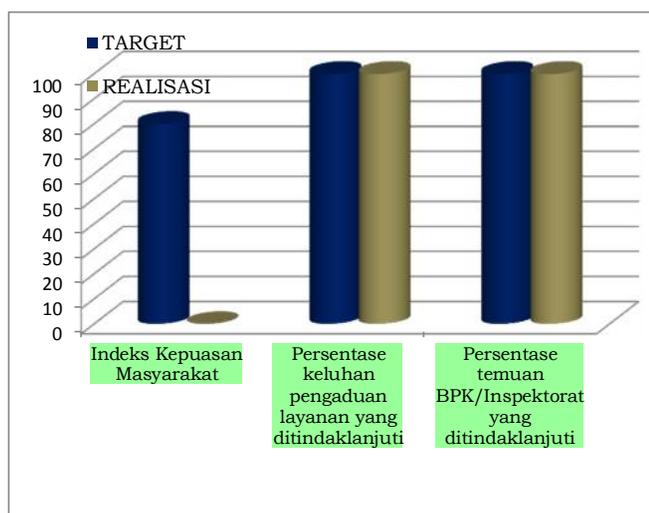
3. Indikator nilai hasil evaluasi AKIP

Nilai hasil evaluasi AKIP SKPD menjadi indikator yang cukup menentukan terhadap kualitas kinerja SKPD, karena semakin baik nilai evaluasi AKIP SKPD menunjukkan bahwa pola manajemen dalam suatu organisasi telah berjalan dengan baik dari mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dimana seluruh unsur tersebut menentukan tingkat keberhasilan SKPD dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi AKIP SKPD setiap tahunnya dilaksanakan oleh Inspektorat Kab.HSS Target nilai evaluasi AKIP pada Dinas Sosial Kab. HSS yang ditetapkan pada Tahun 2018 kategori A.

Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya nilai evaluasi AKIP Dinas Sosial Kab. HSS akan terus meningkat sehingga dapat menunjang nilai evaluasi AKIP Pemerintah Kab. HSS untuk memperoleh nilai A.

4. Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Temuan atas hasil pemeriksaan BPK atas laporan pertanggungjawaban keuangan harus selalu ditindaklanjuti sehingga target yang ditetapkan untuk indikator ini harus 100%. Selain persentase tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK, diharapkan jumlah temuan dari hasil pemeriksaan tersebut setiap tahun mengalami pengurangan atau bahkan tidak ada sama sehingga dapat predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" dalam pelaporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kab. HSS dapat diperoleh. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dinas Sosial Kab. HSS Tahun 2017 hanya terdapat 1 (satu) temuan dari BPK, namun demikian atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti melalui proses koordinasi yang intensif dengan Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kab. HSS.

Grafik 3.10**Capaian Indikator Kinerja Sasaran 10 dibandingkan Dengan Target****Tabel 3.31****Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Sasaran 10 Tahun Ini dengan Tahun-Tahun Lalu**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	REALISASI THN 2016	REALISASI THN 2017	REALISASI THN 2018 TW I	CAPAIAN KINERJA
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,22	83,28	0	-
Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Tetap
Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	Nilai	B	BB	-	-
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	Tetap

Faktor pendukung dalam mencapai sasaran yaitu :

- Dukungan sumber daya manusia yang potensial;
- Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan petunjuk teknis pada pelayanan yang ada;
- Dukungan sarana prasarana kerja yang memadai;
- Adanya dukungan dari masyarakat penerima pelayanan untuk mengikuti prosedur pelayanan sesuai yang dipersyaratkan.

Faktor penghambat dalam mencapai sasaran yaitu :

- Keterbatasan petugas yang memberikan pelayanan;
- Keinginan dan harapan dari masyarakat agar pelayanan dapat diterima dengan cepat sementara pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku;

- Akurasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu :

- Memaksimalkan pelayanan dengan memanfaatkan dukungan tenaga sosial dan tenaga kontrak untuk operator;
- Petugas pelayanan selalu stand by di ruang pelayanan dan bergantian pada saat jam istirahat;
- Memberikan penjelasan secara baik kepada masyarakat tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pelayanan;
- Memasang keterangan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di ruang pelayanan.
- Optimalisasi proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi kegiatan serta peningkatan kualitas data yang ada.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada sasaran 10 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.32

Pagu dan Realisasi Anggaran Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 10

Sasaran	Indikator Kegiatan	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja		Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran		
	Gedung kantor dengan kondisi baik	Penyediaan jasa surat menyurat	3.070.000	783.000
	Peralatan gedung kantor dengan kondisi baik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.602.000	11.843.836
	Perlengkapan gedung kantor dengan kondisi baik	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.250.000	242.000
	Mobil operasional laik jalan	Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	11.000.000	0
	Kendaraan operasional laik jalan	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.050.000	3.000.000
	Kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan	Penyediaan alat tulis kantor	49.295.500	22.704.950
	Laporan kepegawaian diselesaikan tepat waktu	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.103.210	1.156.800

	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.409.000	1.994.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56.160.000	4.858.000
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.800.000	565.000
	Penyediaan makanan dan minuman	17.540.000	3.420.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	313.000.000	34.893.000
	Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	81.850.000	18.450.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	54.000.000	1.240.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	86.360.000	0
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.500.000	1.500.000
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	82.400.000	18.950.000
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
Laporan AKIP diselesaikan tepat waktu	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	5.059.920	1.452.000
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diselesaikan tepat waktu			
Laporan Keuangan diselesaikan tepat waktu			
J U M L A H		974.449.630	127.052.586

Dokumentasi Kegiatan Pendukung Sasaran Strategis 10



Pusat Pelayanan PMKS “Rumah Biru Sehati” pada Dinas Sosial Kab. HSS



Kunjungan Deputy Pelayanan Publik
KemenPAN RB ke Rumah Biru Sehati



Pohon Apresiasi Layanan

- Gantungan Biru : Sangat Puas
- Gantungan Hijau : Puas
- Gantungan Kuning : Kurang Puas
- Gantungan Merah : Tidak Puas

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada bagian ini akan diuraikan pagu anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja. Di dalamnya terdapat alokasi anggaran, realisasi keuangan, persentasi capaian dan sisa anggaran pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun Anggaran 2018 yang diambil dari Laporan Fisik dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.33

**Alokasi dan Realisasi pada Bidang Pemberdayaan Sosial
Triwulan I Tahun 2018**

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya				
	1. Kegiatan Pendampingan Usaha Bagi Keluarga Miskin	56.362.880	0	0,00	56.362.880
	2. Kegiatan Penyaluran Pangan Bagi masyarakat Miskin	279.134.900	10.044.400	3,60	269.090.500
	3. Kegiatan Penyediaan Program Rumah Sejahtera	153.106.000	2.680.000	1,75	150.426.000
2.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
	1. Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	18.910.000	0	0,00	18.910.000
	2. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23.132.080	0	0,00	23.132.080
	3. Pembinaan Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat	6.800.000	0	0,00	6.800.000
	4. Pembinaan Karang Taruna	139.663.520	0	0,00	139.663.520
	5. Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	3.100.000	0	0,00	3.100.000
	6. Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	190.926.000	49.250.000	25,80	141.676.000
	7. (Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	148.004.000	36.630.000	24,75	111.374.000
3.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan				
	1. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	4.342.640.000	709.015.000	16,33	3.633.625.000
J U M L A H		5.361.779.380	807.619.400	15,06	4.554.159.980

Alokasi anggaran untuk **Bidang Pemberdayaan Sosial** sebesar Rp. 5.361.779.380, realisasi keuangan pada Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp. 807.619.400 atau 15,06% digunakan untuk :

1. Fasilitasi penyaluran beras sejahtera gratis untuk masyarakat miskin sebanyak 13.834 KK yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Administrasi dan koordinasi untuk Program Rumah Sejahtera;
3. Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Tabel 3.34

**Alokasi dan Realisasi pada Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
Triwulan I Tahun 2018**

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
	1. Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar	82.505.760	4.600.000	5,58	77.905.760
	2. Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia miskin dan terlantar	115.622.880	288.000	0,25	115.334.880
2.	Program Pembinaan Anak Terlantar				
	1. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	122.260.000	71.000.000	58,07	51.260.000
3.	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma				
	1. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	154.853.440	39.851.440	25,73	115.002.000
4.	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)				
	1. Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	69.992.640	38.650.000	55,22	31.342.640
	2. Peningkatan pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar	111.050.000	12.725.000	11,46	98.325.000
J U M L A H		656.284.720	167.114.440	25,46	489.170.280

Alokasi anggaran untuk **Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial** sebesar Rp. 656.284.720, realisasi keuangan pada Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp. 167.114.440 atau 25,46% digunakan untuk :

1. Fasilitasi pembinaan untuk 20 orang anak di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan bantuan barang modal usaha, Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) untuk 11 orang;
2. Fasilitasi pelayanan sosial terhadap anak untuk 1 kasus adopsi;
3. Koordinasi fasilitasi bantuan sosial untuk anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang cacat;
4. Praktek Belajar Kerja (PBK) untuk 10 orang penyandang disabilitas;
5. Seleksi perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 20 orang dan 10 orang untuk pembinaan di Panti Sosial Bina Wanita (PSBW);
6. Penertiban gelandangan dan pengemis sebanyak 9 orang;
7. Penanganan masyarakat terlantar/tuna sosial lainnya sebanyak 7 orang (pemulangan masyarakat terlantar ke daerah asalnya sebanyak 3 orang dan eks Narapidana sebanyak 4 orang).

Tabel 3.35

**Alokasi dan Realisasi pada Bidang Perlindungan Sosial
Triwulan I Tahun 2018**

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
	1. Perlindungan sosial bagi korban bencana	477.936.880	59.140.000	12,37	418.796.880
2.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				
	1. Pembinaan kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan	184.162.000	12.980.000	7,05	171.182.000
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	51.500.000	0	0,00	51.500.000
J U M L A H		713.598.880	72.120.000	10,11	641.478.880

Alokasi anggaran untuk **Bidang Perlindungan Sosial** sebesar Rp. 713.598.880, realisasi keuangan pada Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp. 72.120.000 atau 10,11% digunakan untuk :

1. Fasilitasi penyaluran bantuan tanggap darurat korban bencana kepada 24 KK/77 jiwa (Kebakaran, pohon tumbang dan puting beliung);
2. Insentif TAGANA dan piket posko kebencanaan di markas komando TAGANA.

Tabel 3.36

**Alokasi dan Realisasi pada Sekretariat
Triwulan I Tahun 2018**

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp)
1.	Belanja Tidak Langsung	3.656.799.000	627.482.011	17,16	3.029.316.989
	1. Gaji dan Tunjangan	2.623.224.000	440.161.931	16,78	2.183.062.069
	2. Tambahan Penghasilan	1.033.575.000	187.320.080	18,12	846.254.920
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1. Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	3.070.000	783.000	25,50	2.287.000
	2. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93.602.000	11.843.836	12,65	81.758.164
	3. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16.250.000	242.000	1,49	16.008.000
	4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	11.000.000	0	0,00	11.000.000
	5. Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.050.000	3.000.000	19,93	12.050.000
	6. Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	49.295.500	22.704.950	46,06	26.590.550
	7. Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11.103.210	1.156.800	10,42	9.946.410
	8. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi	3.409.000	1.994.000	58,49	1.415.000

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	listrik/penerangan bangunan kantor				
	9. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56.160.000	4.858.000	8,65	51.302.000
	10. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800.000	565.000	11,77	4.235.000
	11. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	17.540.000	3.420.000	19,50	14.120.000
	12. Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	313.000.000	34.893.000	11,15	278.107.000
	13. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Lainnya	81.850.000	18.450.000	22,54	63.400.000
	14. Kegiatan Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	54.000.000	1.240.000	2,30	52.760.000
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	86.360.000	0	0,00	86.360.000
	2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70.500.000	1.500.000	1,23	69.000.000
	3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	82.400.000	18.950.000	23,00	63.450.000
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				
	1. Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.059.920	1.452.000	28,70	3.607.920
J U M L A H		4.631.248.630	754.534.597	16,29	3.876.714.033

Alokasi anggaran untuk **Sekretariat** sebesar Rp. 4.631.248.630, realisasi keuangan pada Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp. 754.534.597 atau 16,29% digunakan untuk :

1. Fasilitasi administrasi perkantoran;
2. Fasilitasi gedung kantor dengan kondisi baik;
3. Fasilitasi peralatan dan perlengkapan gedung kantor dengan kondisi baik;
4. Fasilitasi mobil dan kendaraan operasional laik jalan;
5. Fasilitasi administrasi kepegawaian;
6. Fasilitasi penatausahaan administrasi perencanaan dan keuangan.

3.5 Prestasi / Penghargaan

Pada Triwulan I Tahun 2018 ini belum ada prestasi yang diraih oleh Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan baik untuk Tingkat Provinsi maupun Tingkat Nasional.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Triwulan I ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LAKIP Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Triwulan I ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kab. HSS dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2018 Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan menetapkan sebanyak 10 (sepuluh) sasaran dengan 16 (enam belas) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 90,59% atau belum mencapai target;
- 2) Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 94,26% atau belum mencapai target;
- 3) Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai capaian 3,18% dan 0% atau belum mencapai target;
- 4) Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan nilai capaian 73% atau belum mencapai target;
- 5) Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 68,75% atau belum mencapai target;
- 6) Sasaran 6 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 90,03% dan 0% atau belum mencapai target;
- 7) Sasaran 7 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100% atau interpretasi sesuai target;

- 8) Sasaran 8 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 0% atau belum mencapai target;
- 9) Sasaran 9 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 0% atau belum mencapai target;
- 10) Sasaran 10 terdiri dari 4 indikator dengan nilai 2 indikator 0% atau belum mencapai target dan 2 indikator 100% atau interpretasi sesuai target.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 10 (sepuluh) sasaran tersebut, mayoritas pencapaian sasaran belum mampu mencapai target dikarenakan pada triwulan I Tahun 2018 ini masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.112.005.810,00 sedangkan realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp. 1.966.638.437,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 16,24%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 10.145.367.373,00 (*termasuk belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan pegawai*).

Sedangkan untuk realisasi belanja langsung saja (*diluar gaji dan tunjangan pegawai*) pagu sebesar Rp. 8.455.206.810,00 dengan realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2018 sebesar Rp. 1.339.156.426,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 15,84%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 7.116.050.384,00.

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan Triwulan I Tahun 2018 ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kita semua khususnya Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagai gambaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada lintas sektor terkait lainnya baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.



**LAMPIRAN TAHAPAN
CAPAIAN PERJANJIAN
KINERJA TRIWULAN I
TAHUN 2018**

DINAS SOSIAL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT TINGGI PRATAMA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
1	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	Persentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	85.81	%	Triwulan I	77.74%	Jumlah keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya dibagi Jumlah total keluarga miskin x 100% (17.120/22.021 x 100%)	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pendampingan Usaha Bagi Keluarga Miskin	56,362,880	-
									Penyaluran Pangan Bagi masyarakat Miskin	279,134,900	10,044,400
									Penyediaan Program Rumah Sejahtera	153,106,000	2,680,000
2	Meningkatnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	79.39	%	Triwulan I	74.83%	Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS dibagi jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang ada x 100% (226/302 X 100%)	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	18,910,000	-
									Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23,132,080	-
									Pembinaan Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat	6,800,000	-
									Pembinaan Karang Taruna	139,663,520	-
									Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSMB)	3,100,000	-
									Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	190,926,000	49,250,000
									Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	148,004,000	36,630,000
									Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	4,342,640,000
3	Meningkatnya perlindungan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Persentase anak terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90	%	Triwulan I	2.86%	Jumlah anak terlantar yang ditangani dibagi jumlah anak terlantar yang seharusnya ditangani x 100% (32/1.117 x 100%). PSBR dan bantuan barang modal usaha untuk 20 anak, PSAA untuk 11 anak, dan pelayanan kasus adopsi 1. Penyaluran Bansos untuk anak akan dilaksanakan pada triwulan III.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Sosial bagi anak terlantar	82,505,760	4,600,000
								Program Pembinaan Anak Terlantar	Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	122,260,000	71,000,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
		Persentase lanjut usia terlantar yang terlindungi hak hidup dasarnya	90	%	Triwulan I	-	Penyaluran Bansos untuk lansia akan dilaksanakan pada triwulan II.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia miskin dan terlantar	115,622,880	288,000
4	Meningkatnya kemandirian hidup penyandang disabilitas	Persentase penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri	10	%	Triwulan I	7.30%	Jumlah penyandang disabilitas yang mampu hidup mandiri dibagi Jumlah penyandang disabilitas yang terdata x 100% (24 + 36 + 10 / 959 x 100%)	Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma	Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	154,853,440	39,851,440
5	Meningkatnya kualitas hidup Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE)	Persentase perempuan rawan sosial ekonomi yang meningkat kualitas hidupnya	40	%	Triwulan I	27.50%	Jumlah PRSE yang meningkat kualitas hidupnya dibagi jumlah PRSE yang terdata x 100% (40 + 60 + 10 / 400 x 100%)	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	69,992,640	38,650,000
6	Meningkatnya perubahan perilaku PMKS jalanan (Gepeng dan WTS)	Persentase gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku	21.27	%	Triwulan I	19.15%	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mengalami perubahan perilaku dibagi Jumlah gelandangan dan pengemis yang terdata x 100% (9 / 47 x 100%)		Peningkatan pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar	111,050,000	12,725,000
		Persentase wanita tuna susila yang mengalami perubahan perilaku	20	%	Triwulan I	-	Jumlah Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku dibagi Jumlah Wanita Tuna Susila yang terdata x 100%				
7	Meningkatnya ketepatan waktu penanganan korban bencana alam	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 (tiga) hari	100	%	Triwulan I	100%	Jumlah korban bencana alam yang menerima bantuan kurang dari 3 hari dibagi Jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan x 100% (77/77 x 100%). Korban bencana yang mendapat bantuan sebanyak 24 KK/77 jiwa, yaitu : Kebakaran 7 KK/23 jiwa, pohon tumbang 9 KK/27 jiwa, puting beliung 8 KK/27 jiwa	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Perlindungan sosial bagi korban bencana	477,936,880	59,140,000
8	Meningkatnya kondisi pulih psikologis korban tindak kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan yang pulih kondisi psikologisnya	50	%	Triwulan I	-	Tidak ada laporan kasus tindak kekerasan yang dilaporkan ke Dissos Kab. HSS				

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
9	Terwujudnya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan	Persentase pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	100	%	Triwulan I	-	Santunan/bantuan sosial berupa tali asih diberikan 3 x dalam setahun yaitu pada peringatan 17 Mei, 17 Agustus dan 10 November	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan	184,162,000	12,980,000
		Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	100	%	Triwulan I	-	Dijadwalkan pada triwulan II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	51,500,000	-
10	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Indeks	Triwulan I	-	Belum dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018	Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	3,070,000	783,000
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100	%	Triwulan I	100%	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 8 pengaduan		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93,602,000	11,843,836
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A	Nilai	Triwulan I	-	Belum dilaksanakan penilaian Laporan AKIP Tahun 2018		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16,250,000	242,000
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	%	Triwulan I	100%	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti sebanyak 1 temuan		Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	11,000,000	-
									Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	15,050,000	3,000,000
									Penyediaan alat tulis kantor	49,295,500	22,704,950
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,103,210	1,156,800
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,409,000	1,994,000
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56,160,000	4,858,000
									Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,800,000	565,000
Penyediaan makanan dan minuman	17,540,000	3,420,000									
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	313,000,000	34,893,000									

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Capaian Kinerja	Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	81,850,000	18,450,000
							Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	54,000,000	1,240,000
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	86,360,000	-
							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70,500,000	1,500,000
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	82,400,000	18,950,000
						Peningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	5,059,920	1,452,000

Kandangan, April 2018



Pihak Pertama,
Kepala Dinas Sosial Kab. HSS,

Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670328 198611 2 001

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
 BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
 DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Meningkatnya pemberdayaan keluarga miskin	Cakupan keluarga miskin yang mampu melakukan usaha ekonomis produktif dengan baik	75	%	Triwulan I	0	Dana Bansos untuk UEP belum dapat dicairkan. Yang mampu melakukan UEP dari tahun 2014 s/d 2017 sebanyak 255 KK	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pendampingan Usaha Bagi Keluarga Miskin	56,362,880	-
		Cakupan eks Komunitas Adat Terpencil yang mampu melakukan usaha ekonomis produktif dengan baik	70	%	Triwulan I	0	Belum ada usulan dari eks. KAT				
		Cakupan keluarga miskin yang mendapatkan bantuan beras sejahtera sesuai dengan peruntukannya	100	%	Triwulan I	100%	Rastra gratis dibagikan kepada 13.834 KK setiap bulan		Penyaluran Pangan Bagi masyarakat Miskin	279,134,900	10,044,400
		Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin	65.22	%	Triwulan I	60%	Jumlah rumah tidak layak huni yang telah direhabilitasi dibagi Jumlah rumah tidak layak huni sesuai database x 100% (3.031/5.052 x 100 %). Masih sama dengan kondisi tahun 2017 karena dana Bansos untuk rehab rumah tidak layak huni belum dapat dicairkan		Penyediaan Program Rumah Sejahtera	153,106,000	2,680,000
2	Meningkatnya lembaga/organisasi dan relawan sosial yang memenuhi standar kompetensi	Cakupan Lembaga/Organisasi sosial yang aktif dalam pemberdayaan sosial	61.33	%	Triwulan I	52.44%	Jumlah lembaga/organisasi sosial yang aktif dalam kegiatan Sosial dibagi jumlah lembaga/organisasi sosial yang ada x 100% (43/82 x 100%)	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	18,910,000	-
									Pembinaa Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23,132,080	-
									Pembinaan Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat	6,800,000	-
									Pembinaan Karang Taruna	139,663,520	-
									Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	3,100,000	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Capaian Kinerja	Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cakupan relawan sosial yang aktif dalam penanganan masalah sosial	85.52 %	Triwulan I 83.18%	Jumlah relawan/petugas sosial yang aktif dibagi Jumlah relawan/petugas sosial yang ada x 100% (183/220 x 100%)		Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	190,926,000	49,250,000
							Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	148,004,000	36,630,000
						Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	4,342,640,000	709,015,000

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Dinas Sosial Kab. HSS,

Hi. SITI ERMA, S.Sos. M.AP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670328 198611 2 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial,

RAKHMANI, S.Sos. M.Si
 NIP. 19731121 199403 1 004

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL KELUARGA MISKIN
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Capaian Kinerja	Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Terlaksananya fasilitasi usaha ekonomis produktif bagi Keluarga Miskin	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan usaha ekonomis produktif (UEP)	130	KK	Triwulan I	0	Dana Bansos untuk UEP belum dapat dicairkan. Yang mampu melakukan UEP dari tahun 2014 s/d 2017 sebanyak 255 KK	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pendampingan Usaha Bagi Keluarga Miskin	56,362,880	-
2	Terlaksananya fasilitasi usaha ekonomis produktif bagi eks komunitas adat terpencil	Jumlah KK dalam eks Komunitas Adat Terpencil yang mendapat bantuan UEP	10	KK	Triwulan I	0	Belum ada usulan dari eks. KAT				
3	Terlaksananya fasilitasi penyaluran beras sejahtera bagi masyarakat miskin sesuai dengan peruntukannya	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) yang mendapatkan bantuan beras sejahtera	15,238	RTSPM	Triwulan I	13,834	Kouta penerima Rastra dari Kemensos menjadi 13.834 KK. Rastra gratis diberikan setiap bulan pada tahun berjalan		Penyaluran Pangan Bagi masyarakat Miskin	279,134,900	10,044,400

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial,

RAKHMANI, S.Sos, M.Si
NIP. 1973121 199403 1 004

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin,

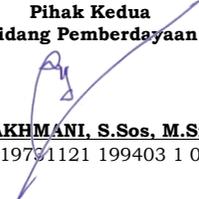
FERRY SETIAWAN, S.ST, MPSSp
NIP. 19770114 200604 1 005

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
SEKSI FASILITASI DAN PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT MISKIN
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
1	Tersedianya pemenuhan tempat tinggal layak huni bagi masyarakat miskin	Jumlah rumah keluarga miskin tidak layak huni yang direhabilitasi	425	Buah	Triwulan I	0	Dana Bansos untuk rehab rumah tidak layak huni belum dapat dicairkan karena menyesuaikan jadwal pencairan dari Bakeuda	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Penyediaan Program Rumah Sejahtera	153,106,000	2,680,000

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial,


RAKHMANI, S.Sos, M.Si
NIP. 19751121 199403 1 004

Pihak Pertama
Kepala Seksi Fasilitasi dan Peningkatan Akses Masyarakat Miskin,


DIDIEK WAHYUDI, ST
NIP. 19830115 201101 1 008

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
SEKSI PEMBERDAYAAN ORGANISASI DAN LEMBAGA SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Capaian Kinerja	Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Tersedianya Lembaga/Organisasi Sosial yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah lembaga sosial yang aktif	16	Lembaga	Triwulan I	18	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) bertambah 2 buah dari tahun lalu menjadi 16 buah, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 1 buah, Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial 1 buah	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan Organisasi Sosial/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	18,910,000	-	
		Jumlah organisasi sosial yang aktif	25	Orang	Triwulan I	20			Karang Taruna berjumlah 54 Buah	Pembinaa Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	23,132,080	-
		Jumlah Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) yang aktif	5	Buah	Triwulan I	5			WKSBM berjumlah 10 Buah	Pembinaan Koordinator Kesejahteraan Keluarga dan Sosial Masyarakat	6,800,000	-
										Pembinaan Karang Taruna	139,663,520	-
2	Tersedianya relawan sosial yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang aktif	25	Orang	Triwulan I	20	PSM berjumlah 57 Orang	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Pembinaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	3,100,000	-	
		Jumlah Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial yang aktif	5	Orang	Triwulan I	4				Pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	190,926,000	49,250,000
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang aktif	11	Orang	Triwulan I	11				Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	148,004,000	36,630,000
		Jumlah Sarjana Pendamping Desa Sejahtera yang aktif	148	Orang	Triwulan I	148		Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	4,342,640,000	709,015,000		

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial,

RAKHMANI, S.Sos, M.Si
NIP. 19731121 199403 1 004

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi dan Lembaga Sosial,

H. SARIPUDIN, S.Sos, S.Ag
NIP. 19680509 199102 1 001

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PENGELOLA PEMBINAAN BANTUAN
PADA SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL KELUARGA MISKIN
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
1	2	3	4		5		6
1.	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pembinaan bantuan	1. Jumlah bahan kerja dan data pengelolaan pembinaan bantuan yang telah disiapkan	48	Dokumen	Triwulan I	12 Dokumen	
		2. Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan pembinaan bantuan yang dilakukan	120	Kegiatan	Triwulan I	30 Kegiatan	
		3. Jumlah laporan pengelolaan pembinaan bantuan yang disusun	250	Laporan	Triwulan I	60 Laporan	
		4. Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	24	Laporan	Triwulan I	6 Laporan	

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga
Miskin,



FERRY SETIAWAN, S.ST., M.PSSp.
NIP. 19770114 200604 1 005

Pihak Pertama
Pengelola Pembinaan Bantuan,



RUSMILAWATI
NIP. 19631013 198603 2 017

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PENGELOLA BANTUAN ORGANISASI MASYARAKAT SOSIAL
PADA SEKSI PEMBERDAYAAN ORGANISASI DAN LEMBAGA SOSIAL
BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

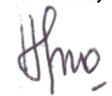
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN	
1	2	3	4		5		6	
1.	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang bantuan organisasi masyarakat sosial	1.	Jumlah bahan kerja dan data pengelolaan bantuan organisasi masyarakat sosial yang disiapkan	72	Dokumen	Triwulan I	18 Dokumen	
		2.	Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan bantuan organisasi masyarakat sosial yang dilaksanakan	48	Kegiatan	Triwulan I	12 Kegiatan	
		3.	Jumlah laporan pengelolaan bantuan organisasi masyarakat sosial yang disusun	250	Laporan	Triwulan I	62 Laporan	
		4.	Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	24	Laporan	Triwulan I	6 Laporan	

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Seksi Pemberdayaan Organisasi dan Lembaga Sosial,


H. SARIPUDIN, S.Sos., S.Ag.
NIP. 19680509 199102 1 001

Pihak Pertama
Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial,


HAMIDAH
NIP. 19730504 199703 2 007

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
 BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
 DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Capaian Kinerja	Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Cakupan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial terhadap pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar	85	%	Triwulan I	2.86%	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar anak sesuai dengan standar dibagi Jumlah anak terlantar yang terdata x 100% (31+1/1.117 X 100%). PSBR dan bantuan barang modal usaha untuk 20 anak, PSAA untuk 11 anak, dan pelayanan kasus adopsi 1. Penyaluran Bansos untuk anak akan dilaksanakan pada triwulan III.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pembinaan Anak Terlantar	Pelayanan Sosial bagi anak terlantar Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	82,505,760 122,260,000	4,600,000 71,000,000
		Cakupan lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar lanjut usia terlantar sesuai dengan standar	85	%	Triwulan I	-	Penyaluran Bansos untuk lansia akan dilaksanakan pada triwulan II.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia miskin dan terlantar	115,622,880	288,000
2	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas	Cakupan penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas sesuai dengan standar	60.06	%	Triwulan I	40.66%	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas sesuai dengan standar dibagi jumlah penyandang disabilitas yang terdata x 100% (184 + 196 + 10 / 959 x 100%)	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	154,853,440	39,851,440
3	Tersedianya pelayanan sosial terhadap perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE)	Cakupan perempuan rawan sosial ekonomi yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar	40	%	Triwulan I	32.50%	Jumlah PRSE yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar dibagi jumlah PRSE yang terdata x 100% (40 + 60 + 30 / 400 x 100%)	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	69,992,640	38,650,000

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
4	Tersedianya pelayanan sosial terhadap PMKS jalanan / Tuna Sosial lainnya	Cakupan PMKS jalanan / tuna sosial lainnya yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar	40.25	%	Triwulan I	27.12%	Jumlah PMKS Jalanan/Tuna Sosial lainnya yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar dibagi Jumlah PMKS Jalanan/Tuna Sosial lainnya yang seharusnya mendapatkan pelayanan sosial x 100% (16/59 x 100%). Penertiban gepeng 9 orang, pemulangan masyarakat terlantar 3 orang dan eks Napi 4 orang		Peningkatan pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar	111,050,000	12,725,000

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Dinas Sosial Kab. HSS,



H. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670328 198611 2 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,

THANTHAWI JAUHARI, A.KS, MPSSp
NIP. 19740919 199903 1 007

TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
SEKSI PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA
BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Capaian Kinerja	Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Tersedianya pelayanan sosial terhadap pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak dan lanjut usia terlantar	Jumlah anak yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar anak sesuai dengan standar	1,117	Orang	Triwulan I	31 Orang	Fasilitasi pembinaan untuk 20 orang anak di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan bantuan barang modal usaha, Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) untuk 11 orang anak, Bansos BERUPAYA dan PKSA rencananya akan disalurkan pada TW III.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan Sosial bagi anak terlantar	82,505,760	4,600,000
		Persentase kasus adopsi dan advokasi anak yang ditangani sesuai dengan standar	80	%	Triwulan I	100%	Jumlah kasus adopsi dan advokasi anak yang ditangani sesuai dengan standar dibagi jumlah kasus yang dilaporkan ke Dissos Kab. HSS X 100 % (1/1 x 100%). Kasus adopsi 1.	Program Pembinaan Anak Terlantar Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	122,260,000	71,000,000
		Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan hak hidup dasar lanjut usia terlantar sesuai dengan standar	2,794	Orang	Triwulan I	0	Penyaluran Bansos untuk lansia akan dilaksanakan pada triwulan II.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia miskin dan terlantar	115,622,880	288,000

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,



THANTHAWI JAUHARI, A.K.S., MPSSp
NIP. 19740919 199903 1 007

Pihak Pertama
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia,



NOOR AISYAH, SP
NIP. 19841103 201001 2 017

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
SEKSI REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS DAN TUNA SOSIAL
BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi Capaian Kinerja	Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan pemenuhan sebagian kebutuhan dasar penyandang disabilitas sesuai dengan standar	196	Orang	Triwulan I	10 Orang	Praktek Belajar Kerja (PBK) untuk 10 orang	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	154,853,440	39,851,440
2	Terlaksananya pelayanan sosial terhadap Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah PRSE yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar	60	Orang	Triwulan I	30 Orang	Seleksi calon siswi Panti Sosial Bina Wanita (PSBW) 20 orang dan Pembinaan di PSBW untuk 10 orang	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Pemberdayaan Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi	69,992,640	38,650,000
3	Terlaksananya pelayanan sosial bagi PMKS Jalanan / Tuna Sosial lainnya	Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar	25	Orang	Triwulan I	9 Orang	Sesuai dengan hasil penertiban gelandangan dan pengemis		Peningkatan pelayanan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial dan masyarakat terlantar	111,050,000	12,725,000
		Jumlah wanita tuna susila yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar	5	Orang	Triwulan I	-	Tidak ada Wanita Tuna Susila yang ditertibkan. Tahun 2017 ada 1 orang yang ditertibkan				
		Persentase penyandang penyakit sosial lainnya dan masyarakat terlantar yang mendapat pelayanan sosial sesuai dengan standar	70	%	Triwulan I	100%	Jumlah tuna sosial lainnya dan masyarakat terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial dibagi yang seharusnya mendapatkan pelayanan x 100 % (7/7 x 100%). Sesuai dengan laporan yang masuk ke Dissos Kab. HSS. Pemulangan Masyarakat Terlantar 3 orang dan eks Napi 4 orang				

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,


THANTHAWI JAUHARI, A.KS, MPSSp
NIP. 19740919 199903 1 007

Pihak Pertama
Kepala Seksi Rehabilitasi penyandang disabilitas dan Tuna Sosial,


SIS IRIANDI
NIP. 19630918 199011 1 001

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PENGELOLA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL & LANSIA
PADA SEKSI PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA
BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
1	2	3	4		5		6
1.	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pelayanan rehabilitasi sosial dan lansia	1. Jumlah bahan kerja dan data pengelolaan pelayanan rehabilitasi sosial dan lansia yang disiapkan	2,885	Dokumen	Triwulan I	2.885 Dokumen	Data usulan penerima Bansos Jadup Lansia yang dimasukkan ke Bakeuda
2.		Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan pelayanan rehabilitasi sosial dan lansia yang dilakukan	11	Kegiatan	Triwulan I	3 Kegiatan	Koordinasi dengan Samping Desa, Kecamatan dan Bakeuda
3.		Jumlah laporan pengelolaan pelayanan rehabilitasi sosial dan lansia yang disusun	11	Laporan	Triwulan I	2 Laporan	Data penerima Bansos dan Data usulan penerima Bansos Jadup Lansia
4.		Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	12	Laporan	Triwulan I	3 Laporan	

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia,



NOOR AISYAH, S.P.

NIP. 19841103 201001 2 017

Pihak Pertama
Pengelola Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Lansia,



RISMAYANI

NIP. 19840605 201001 2 003

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PENGADMINISTRASI ANAK TERLANTAR
PADA SEKSI PELAYANAN SOSIAL ANAK DAN LANJUT USIA
BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
1	2	3	4		5		6
1.	Terlaksananya penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian di bidang anak terlantar	1. Jumlah bahan kerja dan data bidang administrasi anak terlantar yang disiapkan	110	Dokumen	Triwulan I	110 Dokumen	Data usulan penerima Bansos PKSA dan Berupaya yang dimasukkan ke Bakeuda
2.		Jumlah kegiatan penerimaan bahan kerja yang dilakukan	110	Berkas	Triwulan I	110 Berkas	Data persiapan kelengkapan penerima Bansos
3.		Jumlah pencatatan bahan kerja yang dilakukan	22	Berkas	Triwulan I	11 Berkas	Usulan data penerima Bansos untuk 11 Kecamatan
4.		Jumlah berkas administrasi anak terlantar yang didokumentasikan	22	Berkas	Triwulan I	11 Berkas	Ditindaklanjuti untuk 11 Kecamatan
5.		Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	48	Laporan	Triwulan I	12 Laporan	

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia,

NOOR AISYAH, S.P.
NIP. 19841103 201001 2 017

Pihak Pertama
Pengadministrasi Anak Terlantar,

KISWATI
NIP. 19650807 198703 2 017

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PENGADMINISTRASI REHABILITASI MASALAH SOSIAL
PADA SEKSI REHABILITASI PENYANDANG DISABILITAS DAN TUNA SOSIAL
BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN	
1	2	3	4		5		6	
1.	Terlaksananya kegiatan penerimaan, pencatatan dan pendokumentasian di bidang rehabilitasi masalah sosial	1.	Jumlah bahan kerja dan data bidang administrasi rehabilitasi masalah sosial yang disiapkan	350	Dokumen	Triwulan I	87 Dokumen	
		2.	Jumlah kegiatan penerimaan bahan kerja yang dilakukan	350	Berkas	Triwulan I	87 Berkas	
		3.	Jumlah pencatatan bahan yang dilakukan	12	Berkas	Triwulan I	2 Berkas	
		4.	Jumlah berkas administrasi rehabilitasi masalah sosial yang didokumentasikan	12	Berkas	Triwulan I	2 Berkas	
		5.	Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	12	Laporan	Triwulan I	2 Laporan	

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Seksi Rehabilitasi Penyandang
Disabilitas dan Tuna Sosial,


SIS IRIANDI

NIP. 19630918 199011 1 001

Pihak Pertama

Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial,


ANDI FUSNANDI

NIP. 19710125 200604 1 008

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
 BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
 DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
1	Tersedianya pelayanan sosial terhadap pemenuhan sebagian kebutuhan dasar korban bencana	Cakupan korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat korban bencana sesuai dengan standar	100	%	Triwulan I	100%	Korban bencana yang mendapat bantuan sebanyak 24 KK/77 jiwa, yaitu : Kebakaran 7 KK/23 jiwa, pohon tumbang 9 KK/27 jiwa, puting beliung 8 KK/27 jiwa	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Perlindungan sosial bagi korban bencana	477,936,880	59,140,000
		Cakupan relawan sosial yang berpartisipasi aktif dalam penanggulangan bencana	90	%	Triwulan I	100%	Relawan penanggulangan bencana (TAGANA) yang berperan aktif sebanyak 76 orang				
2	Tersedianya pelayanan sosial terhadap pemenuhan sebagian kebutuhan dasar korban tindak kekerasan	Cakupan korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan standar	90	%	Triwulan I	-	Tidak ada laporan kasus tindak kekerasan yang dilaporkan ke Dissos Kab. HSS				
3	Tersedianya pelayanan sosial terhadap pemenuhan sebagian kebutuhan dasar veteran dan janda veteran	Persentase veteran dan janda veteran yang telah menerima santunan/ bantuan sosial	100	%	Triwulan I	-	Santunan/bantuan sosial berupa tali asih diserahkan pada peringatan 17 Mei, 17 Agustus dan 10 November	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan	184,162,000	12,980,000
4	Tersedianya Taman Makam Pahlawan yang representatif	Persentase Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	100	%	Triwulan I	-	Dijadwalkan pada triwulan II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	51,500,000	-
5	Meningkatnya pelayanan publik pada bidang perlindungan sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan jaminan sosial dan sumbangan sosial	67	Indeks	Triwulan I	-	Belum dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat				

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Dinas Sosial Kab. HSS,

Hj. SITI FERMA, S.Sos, M.AP
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19670328 198611 2 001

Pihak Pertama
Pt. Kepala Bidang Perlindungan Sosial,


Drs. FAHRUDDIN MUZAKIR
 NIP. 19601210 199203 1 002

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA DAN TINDAK KEKERASAN
BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
1	Terlaksananya pelayanan sosial bagi korban bencana	Persentase korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat korban bencana	100	%	Triwulan I	100%	Korban bencana yang mendapat bantuan sebanyak 24 KK/77 jiwa, yaitu : Kebakaran 7 KK/23 jiwa, pohon tumbang 9 KK/27 jiwa, puting beliung 8 KK/27 jiwa	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Perlindungan sosial bagi korban bencana	477,936,880	59,140,000
2	Tersedianya relawan penanggulangan bencana (TAGANA) yang memenuhi standar kompetensi	Jumlah relawan penanggulangan bencana (TAGANA) yang berperan aktif dalam penanggulangan bencana	76	Orang	Triwulan I	76 Orang	Seluruh anggota TAGANA berperan aktif dalam penanggulangan bencana				
3	Terlaksananya pelayanan sosial bagi korban tindak kekerasan	Persentase korban tindak kekerasan yang mendapatkan pelayanan sosial	90	%	Triwulan I	-	Tidak ada laporan kasus tindak kekerasan yang dilaporkan ke Dissos Kab. HSS				

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua

Plt. Kepala Bidang Perlindungan Sosial,



Drs. FAHRUDDIN MUZAKIR
NIP. 19601210 199203 1 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana dan Korban Tindak Kekerasan,



SAMSUNI
NIP. 19620202 198603 1 041

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
SEKSI KEPAHLAWANAN, PENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
1	Terlaksananya penyerahan santunan/bantuan sosial untuk veteran dan janda veteran pada peringatan hari bersejarah nasional	Jumlah veteran dan janda veteran yang telah menerima santunan/bantuan sosial	104	Orang	Triwulan I	-	Santunan/bantuan sosial berupa tali asih diberikan 3 x dalam setahun yaitu pada peringatan 17 Mei, 17 Agustus dan 10 November	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Pembinaan kepeloporan, keperintisan dan kepahlawanan	184,162,000	12,980,000
2	Terlaksananya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan dengan kondisi baik	1	Lokasi	Triwulan I	-	Dijadwalkan pada triwulan II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	51,500,000	-
3	Tersedianya pelayanan rekomendasi jaminan sosial dan sumbangan sosial	Persentase rekomendasi yang dikeluarkan tepat waktu	80	%	Triwulan I	100%	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan tepat waktu dibagi jumlah rekomendasi yang masuk x 100% (3/3 x 100%). 2 rekomendasi sumbangan untuk mesjid dan 1 untuk yayasan pondok Islam Parigi.				

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua

Plt. Kepala Bidang Perlindungan Sosial,



Drs. FAHRUDDIN MUZAKIR
NIP. 19601210 199203 1 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Kepahlawanan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial,



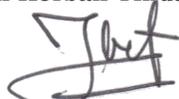
H. ARDIAN NOOR
NIP. 19610604 198101 1 005

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PENGELOLA PERLINDUNGAN SOSIAL
PADA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA DAN TINDAK KEKERASAN
BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN	
1	2	3	4		5		6	
1.	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang perlindungan sosial	1.	Jumlah bahan kerja dan data pengelolaan perlindungan sosial yang disiapkan	120	Dokumen	Triwulan I	25 Dokumen	
		2.	Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan perlindungan sosial yang dilakukan	120	Kegiatan	Triwulan I	22 Kegiatan	
		3.	Jumlah laporan pengelolaan perlindungan sosial yang disusun	12	Laporan	Triwulan I	3 Laporan	
		4.	Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	12	Laporan	Triwulan I	3 Laporan	

Kandangan, April 2018

**Pihak Kedua
Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban
Bencana dan Korban Tindak Kekerasan,**


SAMSUNI

NIP. 19620202 198603 1 041

**Pihak Pertama
Pengelola Perlindungan Sosial,**



RIDUANSYAH, S.Sos.
NIP. 19721209 200604 1 002

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PENGELOLA FASILITAS SOSIAL DAN UMUM
PADA SEKSI KEPAHLAWANAN, PENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN	
1	2	3	4		5		6	
1.	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang fasilitas sosial dan umum	1.	Jumlah bahan kerja dan data pengelolaan fasilitas sosial dan umum yang disiapkan	208	Dokumen	Triwulan I	50 Dokumen	
2.		Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan fasilitas sosial dan umum yang dilakukan	110	Kegiatan	Triwulan I	25 Kegiatan		
3.		Jumlah laporan pengelolaan fasilitas sosial dan umum yang disusun	48	Laporan	Triwulan I	12 Laporan		
4.		Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	24	Laporan	Triwulan I	6 Laporan		

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Seksi Kepahlawanan, Pengelolaan Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial,



H. ARDIAN NOOR
NIP. 19610604 198101 1 005

Pihak Pertama
Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum,



Hj. MAISYURA
NIP. 19660903 198602 2 005

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PENGELOLA FASILITAS SOSIAL DAN UMUM
PADA SEKSI KEPAHLAWANAN, PENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN	
1	2	3	4		5		6	
1.	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang fasilitas sosial dan umum	1.	Jumlah bahan kerja dan data pengelolaan fasilitas sosial dan umum yang disiapkan	208	Dokumen	Triwulan I	45 Dokumen	
2.		Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan fasilitas sosial dan umum yang dilakukan	110	Kegiatan	Triwulan I	27 Kegiatan		
3.		Jumlah laporan pengelolaan fasilitas sosial dan umum yang disusun	48	Laporan	Triwulan I	12 Laporan		
4.		Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	24	Laporan	Triwulan I	6 Laporan		

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
**Kepala Seksi Kepahlawanan, Pengelolaan
Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial,**

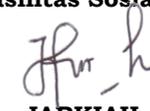


H. ARDIAN NOOR

NIP. 19610604 198101 1 005

Pihak Pertama

Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum,



JARKIAH

NIP. 19670912 199403 2 005

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL
PADA SEKSI KEPAHLAWANAN, PENGELOLAAN SUMBER DANA SOSIAL DAN JAMINAN SOSIAL
BIDANG PERLINDUNGAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN	
1	2	3	4		5		6	
1.	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang kesejahteraan sosial	1.	Jumlah bahan kerja dan data pengelolaan kesejahteraan sosial yang disiapkan	104	Dokumen	Triwulan I	25 Dokumen	
2.		Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan kesejahteraan sosial yang dilakukan	104	Kegiatan	Triwulan I	25 Dokumen		
3.		Jumlah laporan pengelolaan kesejahteraan sosial yang disusun	12	Laporan	Triwulan I	3 Laporan		
4.		Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	12	Laporan	Triwulan I	3 Laporan		

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
**Kepala Seksi Kepahlawanan, Pengelolaan
Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial,**



H. ARDIAN NOOR
NIP. 19610604 198101 1 005

Pihak Pertama
Pengelola Kesejahteraan Sosial,



H. HUSAINI
NIP. 19690805 199303 1 012

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT ADMINISTRATOR (ESELON III)
SEKRETARIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	Indeks	Triwulan I	-	Belum dilaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018	Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	3,070,000	783,000
		Persentase keluhan pengaduan layanan yang ditindaklanjuti	100	%	Triwulan I	100%			Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sebanyak 8 pengaduan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93,602,000
		Indikator nilai hasil evaluasi AKIP	A	Nilai	Triwulan I	-	Belum dilaksanakan penilaian Laporan AKIP Tahun 2018		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16,250,000	242,000
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	%	Triwulan I	100%	Jumlah temuan yang ditindaklanjuti sebanyak 1 temuan		Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	11,000,000	-
									Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15,050,000	3,000,000
									Penyediaan alat tulis kantor	49,295,500	22,704,950
									Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,103,210	1,156,800
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,409,000	1,994,000
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	56,160,000	4,858,000
									Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,800,000	565,000
									Penyediaan makanan dan minuman	17,540,000	3,420,000
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	313,000,000	34,893,000
									Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	81,850,000	18,450,000
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	54,000,000	1,240,000
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	86,360,000	-		
							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70,500,000	1,500,000		
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	82,400,000	18,950,000		
						Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	5,059,920	1,452,000		

Kandangan, April 2018

**Pihak Kedua,
Kepala Dinas Sosial Kab. HSS,**

Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
Peminata Utama Muda
NIP. 19670328 198611 2 001

**Pihak Pertama,
Sekretaris,**


Drs. FAHRUDDIN MUZAKIR
NIP. 19601210 199203 1 002

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
1	Terlaksananya penatausahaan administrasi umum dan kepegawaian	Gedung kantor dengan kondisi baik	2	Buah	Triwulan I	2 Buah		Program Pelayanan Admintrasi Perkantoran	Penyediaan jasa surat menyurat	3,070,000	783,000
		Peralatan gedung kantor dengan kondisi baik	231 / 27	Buah / Jenis	Triwulan I	130 Buah/25 Jenis			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	93,602,000	11,843,836
		Perlengkapan gedung kantor dengan kondisi baik	3 / 2	Buah / Jenis	Triwulan I	1 Buah/1 Jenis			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	16,250,000	242,000
		Mobil operasional laik jalan	5	Buah	Triwulan I	5 Buah			Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	11,000,000	-
		Kendaraan operasional laik jalan	13	Buah	Triwulan I	6 Buah			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.	15,050,000	3,000,000
		Kesesuaian data BMD dengan neraca keuangan	Sesuai	-	Triwulan I	Sesuai	Neraca keuangan Tahun 2017		Penyediaan alat tulis kantor	49,295,500	22,704,950
		Laporan kepegawaian diselesaikan tepat waktu	6	Laporan	Triwulan I	3 Laporan	Laporan kepegawaian yang terdiri dari SKP Tahun 2017 yang dilaporkan bulan Januari Tahun 2018, Anjab dan daftar nominatif Triwulan I		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	11,103,210	1,156,800
									Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,409,000	1,994,000
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	56,160,000	4,858,000
									Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4,800,000	565,000
									Penyediaan makanan dan minuman	17,540,000	3,420,000
									Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	313,000,000	34,893,000
									Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya	81,850,000	18,450,000
								Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	54,000,000	1,240,000	
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor	86,360,000	-		
							Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	70,500,000	1,500,000		
							Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	82,400,000	18,950,000		

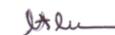
Kandangan, April 2018

Pihak Kedua,
Sekretaris,



Drs. FAHRUDDIN MUZAKIR
NIP. 19601210 199203 1 002

Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,



Hj. SITI JAMILAH, S.AP
NIP. 19690430 198903 2 005

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PEJABAT PENGAWAS (ESELON IV)
KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target		Realisasi Capaian Kinerja		Keterangan	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10
1	Terlaksananya penatausahaan administrasi perencanaan dan keuangan	Laporan AKIP diselesaikan tepat waktu	1	Laporan	Triwulan I	-	Laporan AKIP Tahun 2018 dibuat pada akhir tahun	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD	5,059,920	1,452,000
		Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diselesaikan tepat waktu	1	Laporan	Triwulan I	1 Laporan	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017 yang disusun dan dilaporkan pada bulan Januari Tahun 2018				
		Laporan Keuangan diselesaikan tepat waktu	14	Laporan	Triwulan I	4 Laporan	Laporan Keuangan Tahun 2017 yang disusun dan dilaporkan pada bulan Januari Tahun 2018, Laporan realisasi fisik dan keuangan selama 3 bulan				

Kandangan, April 2018

**Pihak Kedua,
Sekretaris,**



Drs. FAHRUDDIN MUZAKIR
NIP. 19601210 199203 1 002

**Pihak Pertama,
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,**



LEA INDIARTI, S.H.
NIP. 19840725 201001 2 015

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PENGELOLA KEPEGAWAIAN
PADA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
1	2	3	4		5		6
1.	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang kepegawaian	1. Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian yang disiapkan	948	Dokumen	Triwulan I	237 Dokumen	
		2. Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan kepegawaian yang dilakukan	12	Kegiatan	Triwulan I	3 Kegiatan	
		3. Jumlah laporan pengelolaan kepegawaian yang disusun	948	Laporan	Triwulan I	237 Laporan	
		4. Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	12	Laporan	Triwulan I	3 Laporan	

Kandangan, April 2018

**Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,**



Hj. SITI JAMILAH, S.AP.
NIP. 19690430 198903 2 005

**Pihak Pertama
Pengelola Kepegawaian,**



NORMAWATI
NIP. 19710110 199203 2 004

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
PADA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN	
1	2	3	4		5		6	
1.	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana	1.	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang disiapkan	24	Dokumen	Triwulan I	6 Dokumen	
2.		Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang dilakukan	269	Kegiatan	Triwulan I	67 Kegiatan		
3.		Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang disusun	24	Laporan	Triwulan I	6 Laporan		
4.		Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	24	Laporan	Triwulan I	6 Laporan		

Kandangan, April 2018

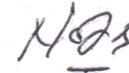
Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,



Hj. SITI JAMILAH, S.AP.
NIP. 19690430 198903 2 005

Pihak Pertama

Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor,



Hj. NORMARLIANA
NIP. 19710919 199303 2 006

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PENGADMINISTRASI UMUM
PADA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN	
1	2	3	4		5		6	
1.	Terlaksananya penyiapan dan penerimaan bahan dan pencatatan serta pendokumentasian di bidang administrasi umum	1.	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan kepegawaian yang disiapkan	12	Dokumen	Triwulan I	3 Dokumen	
		2.	Jumlah kegiatan penerimaan bahan kerja yang dilakukan	100	Berkas	Triwulan I	25 Berkas	
		3.	Jumlah pencatatan bahan yang dilakukan	100	Berkas	Triwulan I	3 Berkas	
		4.	Jumlah berkas administrasi umum yang didokumentasikan	1,492	Berkas	Triwulan I	373 Berkas	
		5.	Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	12	Laporan	Triwulan I	3 Laporan	

b

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,



Hj. SITI JAMILAH, S.AP.
NIP. 19690430 198903 2 005

Pihak Pertama
Pengadministrasi Umum,



IRNIYATI
NIP. 19690517 199308 2 002

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PRAMU KEBERSIHAN
PADA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
1	2	3	4		5		6
1.	Terlaksananya kegiatan penyiapan peralatan dan menjaga kebersihan	1. Jumlah bahan kerja dan peralatan yang berkaitan dengan bidang tugas yang disiapkan	5	Alat kerja	Triwulan I	5 Alat Kerja	
		2. Jumlah kegiatan menjaga kebersihan lingkungan kantor yang dilakukan	538	Kegiatan	Triwulan I	134 Kegiatan	
		3. Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	12	Laporan	Triwulan I	3 Laporan	

Kandangan, April 2018

**Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,**



Hj. SITI JAMILAH, S.AP.
NIP. 19690430 198903 2 005

**Pihak Pertama
Pramu Kebersihan,**



YULIADI
NIP. 19660716 200701 1 016

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA KANTOR
PADA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN	
1	2	3	4		5		6	
1.	Terlaksananya kegiatan pengelolaan penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang sarana dan prasarana	1.	Jumlah bahan kerja dan data yang berkaitan dengan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang disiapkan	24	Dokumen	Triwulan I	6 Dokumen	
2.		Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang dilakukan	269	Kegiatan	Triwulan I	67 Kegiatan		
3.		Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana kantor yang disusun	24	Laporan	Triwulan I	6 Laporan		
4.		Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	24	Laporan	Triwulan I	6 Laporan		

Kandangan, April 2018

**Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,**



Hj. SITI JAMILAH, S.AP.
NIP. 19690430 198903 2 005

**Pihak Pertama
Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor,**



SUPRIADI
NIP. 19850814 201001 1 002

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PRAMU BAKTI
PADA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
1	2	3	4		5		6
1.	Terlaksananya penyiapan peralatan dan penyajian kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan di kantor	1. Jumlah bahan kerja dan peralatan berkaitan dengan bidang tugas yang disiapkan	12	Peralatan Kerja	Triwulan I	3 Peralatan Kerja	
		2. Jumlah kegiatan penyajian kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan kantor yang dilakukan	269	Kegiatan	Triwulan I	67 Kegiatan	
		3. Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	12	Laporan	Triwulan I	3 Laporan	

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian,



Hj. SITI JAMILAH, S.AP
NIP. 19690430 198903 2 005

Pihak Pertama
Pramu Bakti,



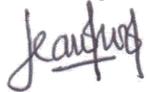
IBRAHIM
NIP. 19731112 200701 1 019

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PENYUSUN PROGRAM ANGGARAN DAN PELAPORAN
PADA SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
1	2	3	4		5		6
1.	Terlaksananya kegiatan penerimaan, pengumpulan, pengklasifikasian dan penelaahan data obyek kerja di bidang program anggaran dan pelaporan	1. Jumlah bahan kerja dan data penyusunan program anggaran dan pelaporan yang disiapkan	180	Dokumen	Triwulan I	45 Dokumen	
		2. Jumlah penerimaan bahan program anggaran dan pelaporan yang dilakukan	180	Kegiatan	Triwulan I	45 Kegiatan	
		3. Jumlah pengumpulan bahan program anggaran dan pelaporan yang dilakukan	180	Kegiatan	Triwulan I	45 Kegiatan	
		4. Jumlah pengklasifikasian program anggaran dan pelaporan yang dilakukan	120	Kegiatan	Triwulan I	30 Kegiatan	
		5. Jumlah penelaahan data objek program anggaran dan pelaporan yang dilakukan	120	Kegiatan	Triwulan I	30 Kegiatan	
		6. Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	72	Laporan	Triwulan I	18 Laporan	

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,



LEA INDIARTI, S.H.
NIP. 19840725 201001 2 015

Pihak Pertama
Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan,



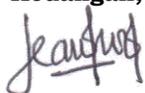
HALIMATUSA'DIAH, S.Sos.
NIP. 19750401 201001 2 006

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
1	2	3	4		5		6
1.	Terlaksananya kegiatan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan terkait transaksi keuangan	1. Jumlah bahan kerja dan data pengelolaan keuangan yang disiapkan	193	Dokumen	Triwulan I	48 Dokumen	
		2. Jumlah kegiatan penerimaan keuangan yang dilakukan	193	Kegiatan	Triwulan I	48 Kegiatan	
		3. Jumlah kegiatan pengeluaran keuangan yang dilakukan	193	Laporan	Triwulan I	48 Laporan	
		4. Jumlah kegiatan pembukuan transaksi keuangan yang dilakukan	193	Laporan	Triwulan I	48 Laporan	
		5. Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	16	Laporan	Triwulan I	4 Laporan	

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan,



LEA INDIARTI, S.H.
NIP. 19840725 201001 2 015

Pihak Pertama
Bendahara Pengeluaran,



SUFIA NORMIATY, S.Sos.
NIP. 19730127 199503 2 002

**TAHAPAN CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2018 PENGELOLA KEUANGAN
PADA SUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET		REALISASI CAPAIAN KINERJA		KETERANGAN
1	2	3	4		5		6
1.	Terlaksananya penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pengelolaan keuangan	1. Jumlah bahan kerja dan data pengelolaan keuangan yang disiapkan	193	Dokumen	Triwulan I	48 Dokumen	
		2. Jumlah kegiatan koordinasi pengelolaan keuangan yang telah dilakukan	193	Kegiatan	Triwulan I	48 Kegiatan	
		3. Jumlah pelaporan pelaksanaan pekerjaan kepada atasan	16	Laporan	Triwulan I	4 Laporan	

Kandangan, April 2018

Pihak Kedua
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan,

LEA INDIARTI, S.H.

NIP. 19840725 201001 2 015

Pihak Pertama
Pengelola Keuangan,

OLIA OLFAH, A.Md.

NIP. 19771103 200701 2 012